



PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG KIYURA DISTRIK MIMIKA BARAT TAHUN 2025

"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"



KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Kiura Distrik Mimika Barat** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Barat beserta seluruh staf, Kepala Kampung Kiura dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupaten Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025
Direktur IPPM,

Yohannes Rahail

KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Kiura ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Kiura dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Kiura bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Kiura dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Kiura ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Kiura.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Kiura ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Kiura dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025
Kepala Kampung Kiura,

Ferdinand Samin

KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kiura** di wilayah Distrik Mimika Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Kiura di Distrik Mimika Barat yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kiura ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025
Kepala Distrik Mimika Barat,

Christian Warinussy, S.Sos

SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kiura, Distrik Mimika Barat** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Barat beserta jajaran, Kepala Kampung Kiura bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Kiura yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Kepala Dinas,

Abraham Y. Kateyau, SE., MH



SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan “Membangun dari kampung ke kota”, maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kiura** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab keteringgalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan “Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Kiura ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025

Bupati,

Johannes Rettob, S.Sos., MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Penyusun	ii
Kata Pengantar Kepala Kampung	iii
Kata Pengantar Kepala Distrik	iv
Sambutan Kepala Dinas PMK	v
Sambutan Bupati Mimika	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
 Bagian I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
Bagian II. METODOLOGI	5
Bagian III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG	10
A. Keadaan Wilayah Kampung	10
1. Sejarah	10
2. Keadaan Wilayah	16
B. Keadaan Perumahan	18
1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah	18
2. Pola Permukiman	19
3. Kepemilikan Rumah	21
4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar	21
5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga	22
6. Kondisi Lingkungan Permukiman	23
7. Masalah utama dan Kebutuhan perumahan.	25
C. Kependudukan	28
1. Suku-suku di Kampung	28
2. Nilai dan Kearifan Lokal	30
3. Keadaan Penduduk	33
4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk	39
D. Pendidikan	42
E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	43
1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit	43
2. Kesehatan	45
3. Gizi	45
4. Keluarga Berencana	47
F. Ekonomi Masyarakat	48

	1. Aktivitas Penduduk	48
	2. Kepemilikan Modal	49
	3. Harga Barang dan Bahan Makanan	50
	4. Potensi dan Peluang Ekonomi	51
	5. Tingkat Kesejahteraan	51
	G. Keamanan dan Ketertiban	52
	1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban	52
	2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban	53
	H. Kelembagaan Kampung	53
	1. Lembaga pemerintah	53
	2. Lembaga kemasyarakatan.....	55
	3. Lembaga Politik	56
	I. Sarana Prasana	56
	1. Transportasi dan Komunikasi	56
	2. Air Bersih dan Sanitasi	58
	3. Penerangan / Energi	59
	4. Pendidikan	59
	5. Kesehatan	60
	6. Ekonomi	61
	7. Peribadatan	61
	8. Olahraga dan Rekreasi	62
Bagian IV.	PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG	65
	A. Infrastruktur Kampung Berstandar Kota	65
	B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal	66
	C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan	66
Bagian V.	PENUTUP	68
	Daftar Pustaka	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Kiura menurut Umur Tahun 2025	34
Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	36
Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Kiura menurut Matapencaharian Tahun 2025	37
Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Kiura menurut Agama Tahun 2025	38
Tabel 3.5 Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah Di Kampung Kiura Tahun 2025	50
Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Kiura	65
Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Kiura	66
Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Kiura	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Titik Lokasi Kampung Kiura	9
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Kiura	54
Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Kiura	54

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni “Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif”. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan “Membangun dari Kampung ke Kota”, dengan pendekatan “Membangun Kampung Rasa Kota”. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai “Gerbang Emas”, yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

C. Manfaat

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
 - a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung
Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
 - b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
 - c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung
Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
 - d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional
Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
 - e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Masyarakat

a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Kiura dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Kiura menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

3. Validasi melalui FGD Kampung

Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

B. Prinsip Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Kiura dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Kiura meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
 - b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
 - c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Barat.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Data sekunder

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Kiura dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Kiura.

2. Data primer

- a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

E. Teknik Analisis Data

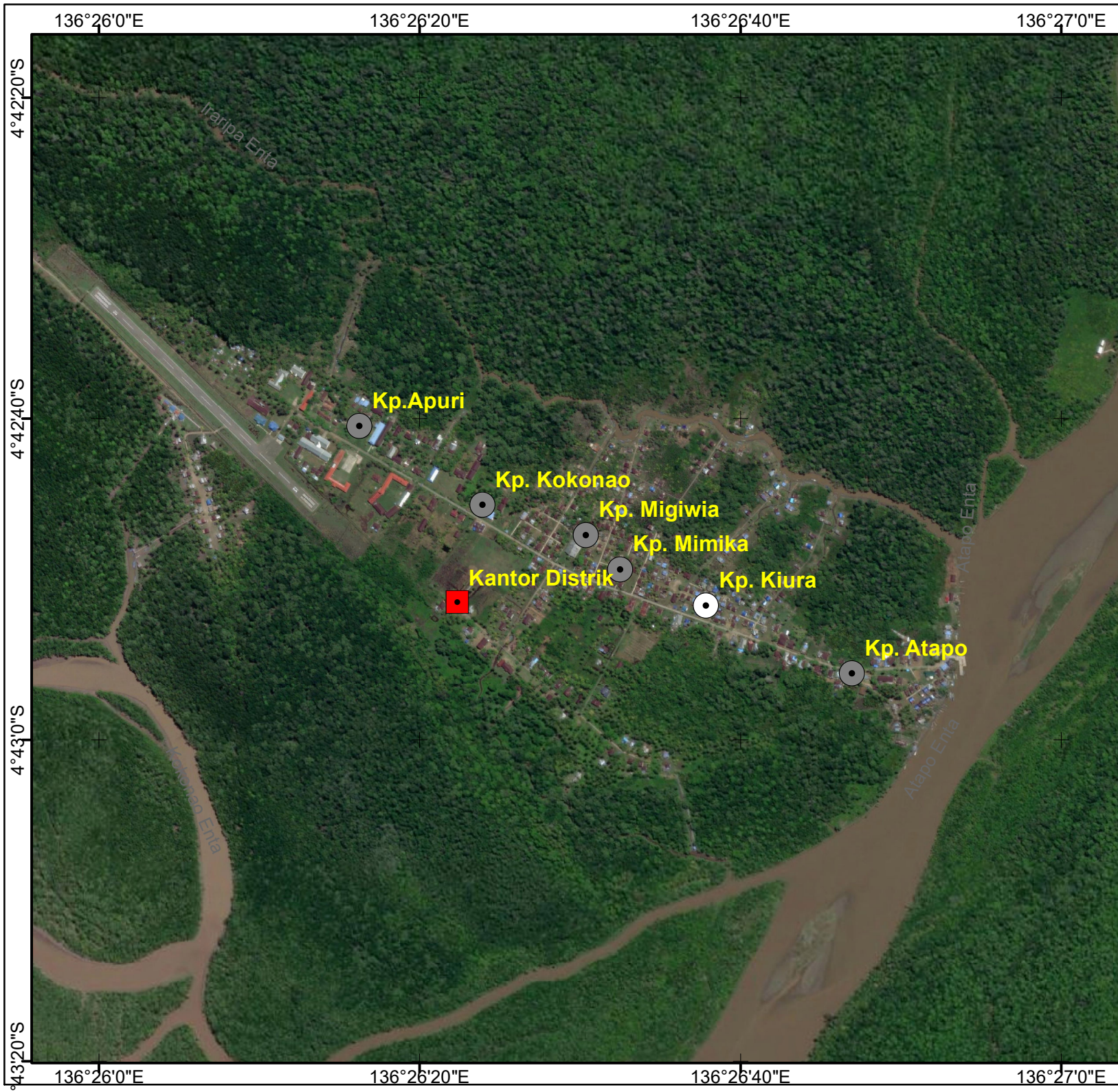
Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Kiura.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penyusunan Profil Kampung Kiura dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Kiura, Distrik Mimika Barat, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.



INSTITUT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

**PETA TITIK LOKASI
KAMPUNG KIURA
DISTRIK MIMIKA BARAT
KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**



Skala 1:10.000



Keterangan :

X : 136° 26' 36,869" E

Y : 4° 42' 51,231" S

● Titik Kampung

● Titik Kampung Lain

■ Kantor Distrik

Datum : WGS 1984

Proyeksi : UTM Zona 54 S

Sistem Kordinat : Geografis dan UTM

Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta



□ Lokasi Pemetaan

BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

A. Keadaan Wilayah Kampung

1. Sejarah

a. Asal-usul kampung

Kampung Kiura diyakini berawal dari sebuah pemukiman lama bernama Buya, yang terletak di hulu Sungai Mimika. Leluhur masyarakat Kiura menetap di wilayah tersebut sebelum kemudian diajak bergabung oleh masyarakat Mimika yang telah lebih dulu menemukan tempat tinggal baru di Kokonau. Pada tahun 1983, seluruh warga Kiura berpindah dan menetap bersama tiga komunitas lain dari kampung Mimika, Migiwiya dan Kokonau di bawah pemerintahan Kampung Kokonau.

Proses pemekaran wilayah pada tahun 1991 menandai berdirinya Kampung Kiura sebagai entitas administratif tersendiri. Nama “Kiura” sendiri muncul dari ungkapan dalam bahasa Kamoro, *kii yura?* yang berarti “apakah itu lintah?”, terucap ketika para leluhur menemukan banyak lintah saat membuka lahan pemukiman baru di Kokonau. Sejak itu, nama tersebut ditetapkan sebagai identitas kampung dan diwariskan hingga kini.

b. Struktur sosial awal

Struktur sosial awal masyarakat Kampung Kiura dibentuk oleh keberadaan dua suku utama, yaitu Suku Ope dan Suku Tani, yang menjadi kelompok pertama yang menduduki dan membangun kehidupan sosial-budaya di kawasan ini. Kedua suku tersebut berkembang menjadi unit-unit kekerabatan yang lebih kecil berupa marga, yang kemudian membentuk dasar pengaturan adat, distribusi ruang hidup, serta hubungan sosial antar keluarga.

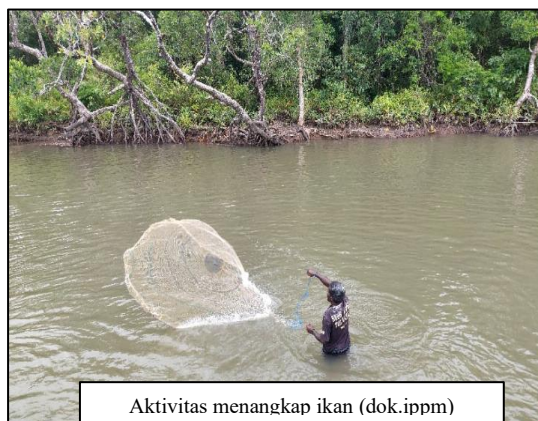
Suku Ope terdiri dari 19 marga yaitu Samin, Mameyau, Maniyu, Yarpaya, Sian, Onama, Wao, Kawai, Sikora, Etewe, Natipiya, Waraopeya, Natuapoka, Tareyaipa, Yakopeyauta, Gebze, Eyau, Pairpipa, Mawapoka. Marga-marga tersebut memiliki kedudukan penting dalam mengatur adat dan tata kehidupan, serta memegang peran dalam pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sementara itu, Suku Tani mencakup 16 marga yaitu Waniyu, Wanini, Nawiuta, Waniniyu, Amuniyu, Take, Wateyau, Kataipukare, Potarapeya, Nakiyaya, Tonami, Waraiiya, Kawarapeya, Weyakoro, Mawiyakeyau, Mameyaipaku. Sebagaimana pada kelompok Ope, masing-masing marga memiliki fungsi sosial yang mengikat anggotanya dalam sistem kekerabatan tradisional, termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat, penyelesaian konflik, hingga mekanisme saling menolong dalam keseharian.

Keberadaan dua suku besar dan marga di bawahnya menunjukkan bahwa masyarakat telah lama mengenal sistem sosial berbasis taparu atau kelompok kekerabatan luas, sebagaimana juga terlihat dalam struktur adat Kampung Kiura. Sistem ini menjadi landasan penting bagi pembentukan identitas kolektif, kohesi sosial, serta pembagian peran antar keluarga dalam kegiatan ekonomi maupun ritual adat.

Dari segi spasial, pola permukiman awal bersifat menyebar mengikuti alur jalan dan jembatan, membentuk deretan rumah yang memanjang dan saling terhubung. Pola permukiman ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan rawa, serta kebutuhan untuk mendekatkan tempat tinggal dengan jalur mobilitas utama, dermaga, dan akses menuju sungai yang merupakan wilayah vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara ekonomi, masyarakat hidup dalam budaya yang sangat erat dengan



Aktivitas menangkap ikan (dok.ippm)

mata pencaharian nelayan, di mana aktivitas menjaring ikan, memancing, dan menangkap kepiting bakau menjadi sumber utama penghidupan. Gambaran ini sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kiura saat ini, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan tangkap dengan pemanfaatan

langsung sumber daya laut dan pesisir secara tradisional.

c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Perkembangan Kampung Kiura tidak terlepas dari perjalanan panjang masyarakatnya yang sejak dahulu hidup dan bermukim di kawasan pesisir dan hulu

Sungai Mimika. Dalam sejarah awalnya, leluhur masyarakat Kiura berasal dari Kampung Buya, sebuah wilayah di hulu sungai yang menjadi pusat aktivitas hidup, berburu, dan mengelola lingkungan secara tradisional. Pola kehidupan masyarakat saat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, dengan mobilitas yang bergantung sepenuhnya pada perahu tradisional sebagai alat transportasi utama menyusuri sungai dan menyeberangi wilayah perairan menuju dusun sagu, tempat berburu, atau kampung tetangga.

Memasuki tahun 1983, terjadi perubahan besar ketika masyarakat Kiura



Perahu tradisional (dok.ippm)



Perahu motor tempel (dok.ippm)

pindah dan bergabung dengan masyarakat Kokonau, Mimika, dan Migiwiya. Perpindahan ini menandai awal terbentuknya pemukiman terpadu di wilayah pesisir. Walaupun kehidupan sudah mulai lebih terorganisir, moda transportasi masyarakat tetap bergantung pada perahu tradisional, sementara sebagian kecil perahu motor tempel (*speedboat/longboat*) baru digunakan untuk perjalanan jarak lebih jauh menuju kota atau hulu sungai. Pada masa ini, mobilitas masyarakat masih

sangat tergantung pada kondisi pasang surut, gelombang laut, dan cuaca pesisir.

Transformasi kelembagaan terjadi pada tahun 1991, ketika Kampung Kokonau dimekarkan menjadi empat kampung termasuk Kiura. Pemekaran ini melahirkan struktur pemerintahan kampung yang mandiri, ditandai dengan terpilihnya Kepala Kampung pertama, Timotius Samin. Periode ini menjadi tonggak penting pembentukan identitas kampung, dengan masyarakat mulai menata wilayah permukiman, membangun hubungan sosial yang lebih kuat, dan mengembangkan sistem adat yang berjalan berdampingan dengan pemerintahan formal. Transportasi pun mulai berkembang, selain perahu dayung atau perahu

tanpa mesin, *speedboat* mulai dimanfaatkan sebagai sarana mobilitas menuju Timika, meskipun penggunaannya masih terbatas.

Memasuki akhir 1990-an hingga 2010-an, perkembangan kampung semakin terlihat dengan hadirnya berbagai program pemerintah, seperti Program Respek (2003), Dana Desa (2015), dan program pendampingan dari lembaga mitra seperti USAID IFACS (2014) dan USAID Lestari (2019). Berbagai bentuk dukungan ini mendorong pembangunan infrastruktur sederhana seperti sumur galian, Penampungan Air Hujan (PAH), peningkatan fasilitas umum, serta perbaikan jalur pemukiman. Namun demikian, mobilitas masyarakat tetap sangat bergantung pada sungai dan laut. *Speedboat* menjadi alat transportasi yang sangat penting untuk membawa hasil tangkapan, melakukan perjalanan ke kota, maupun mengakses layanan kesehatan dan pendidikan di kampung-kampung sekitar.

Pada periode ini pula pola permukiman berkembang menyebar mengikuti badan jalan dan jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah panggung, mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi banjir rob yang terjadi setiap tahun. Aktivitas ekonomi masyarakat terus bertumpu pada perikanan tangkap, sehingga perahu tradisional maupun *Speedboat* sarana transportasi yang utama.

Memasuki tahun-tahun terakhir, perkembangan kampung semakin dipengaruhi dinamika lingkungan dan masuknya aktivitas eksternal seperti perubahan ekosistem pesisir, serta perluasan alami hutan mangrove. Namun masyarakat tetap mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola wilayah kelola adat, menjaga dusun sagu dan memanfaatkan SDA secara tradisional. Transportasi air tetap menjadi satu-satunya jalur mobilitas penduduk, di mana perahu tradisional digunakan untuk aktivitas harian menjaring ikan atau mencari kepiting bakau, sementara *speedboat* digunakan untuk perjalanan antar kampung dan menuju kota.

Secara keseluruhan, perkembangan Kampung Kiura dari masa ke masa menunjukkan perjalanan yang dinamis dari perkampungan adat di hulu sungai menuju komunitas pesisir modern yang lebih terhubung, namun tetap bergantung pada transportasi air dan memegang teguh nilai adat. Hubungan antara sejarah migrasi, pembentukan pemerintahan kampung, perkembangan infrastruktur, dan kepemilikan sarana transportasi air menjadi elemen penting dalam memahami identitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat hingga hari ini.

d. Nilai dan kearifan lokal

Nilai dan kearifan lokal masyarakat Kampung Kiura tercermin dalam berbagai praktik adat yang hingga saat ini masih dijalankan dan dihormati secara turun-temurun. Masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat dalam berbagai fase penting kehidupan, seperti upacara pernikahan, ritual pendewasaan bagi anak laki-laki, serta peringatan 40 hari bagi anggota keluarga yang meninggal dunia. Praktik-praktik ini bukan hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, kohesi, dan identitas kolektif masyarakat kampung.

Dalam ranah kesenian tradisional, masyarakat memiliki tarian Otepe, yaitu tarian penjemputan dan pengantaran tamu terhormat. Tarian ini memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghormatan, penerimaan, dan penyampaian nilai keramahan masyarakat Kamoro. Otepe sekaligus menegaskan bahwa setiap tamu yang datang membawa hubungan kekerabatan dan persaudaraan dengan komunitas lokal, sehingga memerlukan penyambutan yang bernilai adat. Tradisi ini masih dilakukan dalam acara kampung, kunjungan resmi dan perayaan adat lainnya, menunjukkan kelestarian nilai budaya yang tetap terjaga.

e. Identitas kampung saat ini

Identitas Kampung Kiura pada masa kini dibentuk oleh perpaduan nilai budaya, praktik adat, bahasa, serta karya-karya tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Salah satu elemen budaya yang paling menonjol adalah tarian Otepe, yaitu tarian penjemputan dan pengantaran tamu terhormat yang menjadi simbol penghormatan serta wujud keramahan masyarakat Kamoro. Tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari upacara adat, tetapi juga menjadi representasi penting identitas kampung dalam setiap kegiatan resmi dan pertemuan adat.

Struktur sosial masyarakat Kiura tetap bertumpu pada lembaga adat, yang terdiri dari Kepala Suku dan Dewan Adat Kampung. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam menetapkan ketentuan adat, menjaga hak ulayat, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberlangsungan struktur tradisional ini menunjukkan bahwa identitas Kiura masih sangat terkait dengan sistem sosial yang mengutamakan kekerabatan, musyawarah,

dan penghormatan terhadap otoritas adat sebagaimana tercantum dalam struktur adat kampung.

Makanan khas masyarakat Kiura juga menjadi salah satu unsur pembentuk identitas budaya kampung. Bahan pangan utama adalah sagu, yang diolah menjadi makanan tradisional seperti sagu bola bakar. Olahan berbasis sagu ini tidak hanya menjadi konsumsi harian, tetapi juga memiliki nilai kultural yang erat kaitannya dengan tradisi pemanfaatan dusun (kebun) sagu sebagai bagian dari wilayah adat masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan bahasa Mimika sebagai bahasa ibu, yang berfungsi sebagai alat komunikasi internal dalam keluarga dan komunitas adat. Di sisi lain, bahasa Indonesia digunakan dalam konteks layanan publik, pendidikan, dan komunikasi antar kampung. Dua bahasa ini berjalan berdampingan dan memperlihatkan dinamika identitas linguistik yang khas pada masyarakat pesisir Papua.

Identitas kampung juga diperkuat oleh kemampuan masyarakat dalam



menghasilkan karya seni ukir kayu dan pembuatan perahu tradisional. Seni ukir merupakan keahlian turun-temurun yang menggambarkan simbol-simbol budaya Kamoro, sedangkan pembuatan perahu tradisional menunjukkan pengetahuan lokal tentang lingkungan pesisir dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi geografis kampung. Kedua keterampilan ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai simbolik sebagai penanda identitas budaya yang melekat pada masyarakat Kiura.

Secara keseluruhan, identitas Kampung Kiura saat ini dapat dipahami sebagai perpaduan antara kelestarian adat, kekayaan kesenian tradisional, ketahanan budaya

makan sagu, penggunaan bahasa daerah, serta keberlanjutan lembaga adat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Identitas ini membedakan Kiura sebagai kampung pesisir yang tetap menjaga keunikan budaya Kamoro dalam perkembangan kehidupan modern.

2. Keadaan Wilayah

a. Letak geografis

Kampung Kiura merupakan salah satu kampung di wilayah Distrik Mimika Barat, yang berada dalam administrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Secara geografis, kampung ini terletak di kawasan pesisir barat Mimika dan berdekatan dengan pusat pemerintahan distrik di Kokonau. Letak Kiura yang berada di jalur pesisir dan dekat dengan aliran sungai menjadikannya kampung yang strategis dalam hubungan antar wilayah, terutama untuk mobilitas melalui transportasi air.

Kampung Kiura berada pada zona pesisir rendah yang umumnya berada di wilayah sekitar 134° 56' 30" Bujur Timur hingga 4° 18' 14" Lintang Selatan, dengan topografi dataran rendah di Kabupaten Mimika. Posisi ini menempatkan Kiura dalam iklim tropis basah dengan karakteristik lingkungan mangrove, rawa pesisir, dan dataran rendah yang sangat dipengaruhi kondisi pasang surut laut.

Secara administratif, wilayah Kampung Kiura memiliki batas-batas sebagai berikut: di bagian Utara berbatasan dengan Pegunungan Eneea Pukare, sementara di sisi Timur bersebelahan dengan Kampung Atapo. Pada bagian Barat, kampung ini berbatasan dengan Kampung Mimika, dan di bagian Selatan langsung menghadap Laut Arafura.

b. Kondisi topografi dan geomorfologi

Kampung Kiura memiliki karakter topografi dan geomorfologi yang khas sebagai wilayah pesisir dataran rendah di Distrik Mimika Barat. Secara umum, bentuk lahannya terdiri atas dataran rendah, kawasan rawa, zona pesisir, serta aliran sungai yang menjadi bagian integral dari struktur bentang alam kampung. Ketinggian wilayah yang hanya berada pada kisaran 2–3 meter di atas permukaan laut menyebabkan kampung sangat dipengaruhi oleh dinamika pasang surut dan kondisi hidrologi pesisir. Kiura berada pada wilayah dataran rendah pesisir dengan intensitas curah hujan tinggi dan kondisi lingkungan basah.

Secara geomorfologis, kampung berada pada zona transisi antara ekosistem mangrove, rawa sagu, dan dataran lumpur sungai. Sedimentasi alami dari hulu sungai serta dorongan gelombang laut membentuk pola akumulasi material yang terus berkembang, terutama di sekitar muara sungai. Kondisi ini menghasilkan pembentukan daratan baru sekaligus memperluas area mangrove, namun juga meningkatkan risiko genangan pada musim puncak hujan dan saat air laut pasang tinggi.

Karakteristik geomorfologi tersebut menjadikan Kampung Kiura tergolong daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Beberapa potensi bencana yang dominan meliputi genangan air pasang, banjir musiman, gelombang pasang, serta abrasi pesisir. Seluruh kawasan kampung tercatat sebagai titik rawan bencana, karena hampir setiap tahun wilayah permukiman mengalami genangan akibat pasang laut, terutama pada periode musim hujan dan angin timur. Fenomena ini memperlihatkan bahwa topografi rendah dan kedekatan dengan garis pantai menjadi faktor utama penyebab risiko bencana di kampung.

Abrasi juga menjadi ancaman signifikan di beberapa titik pesisir, dipicu oleh gelombang kuat Laut Arafura dan perubahan pola arus. Sementara itu, struktur permukiman masyarakat yang sebagian besar berupa rumah panggung di atas tanah rawa menunjukkan bentuk adaptasi terhadap kondisi geomorfologi dan risiko genangan, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak banjir pasang yang semakin sering terjadi.

Secara keseluruhan, topografi dataran rendah, keberadaan rawa dan mangrove, serta posisi kampung yang langsung berbatasan dengan laut dan sungai menjadi faktor pembentuk identitas lingkungan Kampung Kiura sekaligus menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologis. Informasi ini penting sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko di masa mendatang.

c. Iklim dan kondisi alam

Kampung Kiura berada di wilayah pesisir dengan karakter iklim tropis basah hingga sangat basah, serupa dengan kawasan lain di Distrik Mimika Barat. Sepanjang tahun hanya terdapat dua musim, yaitu musim kemarau pada Januari-

Mei dan musim hujan pada Juni-Desember. Curah hujan rata-rata mencapai ± 500 mm per bulan dengan suhu berkisar antara 22-30°C. Kondisi lembap dan basah ini menopang berbagai ekosistem pesisir yang menjadi ciri khas wilayah Kiura.

Pada puncak musim hujan, beberapa area kampung kerap mengalami genangan, terutama bagian permukiman yang berada lebih rendah atau dekat aliran sungai. Luapan air diperparah oleh pasang tinggi dan angin kencang yang umum terjadi menjelang akhir tahun. Pada masa peralihan musim, angin dari arah laut juga dapat bertiup kuat sehingga mempengaruhi aktivitas melaut serta mobilitas warga yang mengandalkan jalur air. Perubahan cuaca ekstrem ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat dan mempengaruhi pola adaptasi dalam aktivitas harian maupun pemanfaatan sumber daya alam.

Iklim yang sangat basah ini mendukung keberadaan sumber daya alam penting bagi masyarakat Kampung Kiura. Hutan sagu tumbuh subur di wilayah rawa dan menjadi sumber pangan utama. Kawasan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi sekaligus sebagai habitat kepiting, kerang, tambelo, dan berbagai jenis biota pesisir. Sungai-sungai yang mengalir di sekitar kampung bukan hanya jalur transportasi tradisional, tetapi juga sumber ikan, udang, dan hasil perairan lainnya yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Kombinasi curah hujan tinggi, kelembapan sepanjang tahun, serta ekosistem pesisir yang lengkap menjadikan Kampung Kiura kaya akan potensi sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat.

B. Keadaan Perumahan

1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah

Kondisi perumahan di Kampung Kiura secara umum menunjukkan variasi tipe bangunan yang mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan pesisir, serta adaptasi terhadap risiko banjir pasang yang sering terjadi. Bangunan rumah penduduk dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe utama, yaitu semi permanen, dan non permanen atau rumah tradisional. Rumah-rumah tersebut umumnya dibangun menggunakan material kayu dan papan tanpa dinding tembok, menyesuaikan dengan ketersediaan bahan lokal. Sebagian rumah didirikan dengan lantai yang ditinggikan untuk mengurangi dampak genangan air

laut saat pasang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola perumahan masyarakat Kampung Kiura berkembang secara adaptif terhadap tantangan lingkungan pesisir dan keterbatasan sarana pendukung.

Tipe rumah semi permanen menjadi bentuk yang paling umum dijumpai,



ditandai oleh kombinasi penggunaan bahan kayu dan papan pada dinding, dengan atap seng sebagai penutup utama. Adapun rumah non permanen atau tradisional umumnya dibangun menggunakan material lokal, seperti kayu dan rumbia, serta dirancang

sebagai rumah panggung untuk mengantisipasi genangan air dan pasang naik.

Bahan bangunan yang digunakan pada sebagian besar rumah di kampung terdiri dari dinding kayu atau papan, atap seng atau rumbia, serta lantai papan, yang mencerminkan karakter permukiman pesisir dan ketersediaan sumber daya lokal. Penggunaan kayu dan papan menjadi pilihan utama masyarakat karena mudah diperoleh dan sesuai dengan kondisi lingkungan rawa dan dataran rendah. Atap seng mulai lebih banyak digunakan sebagai bagian dari dukungan program perumahan maupun hasil swadaya masyarakat, sedangkan rumbia masih dipertahankan pada beberapa rumah tradisional.

2. Pola Permukiman

Pola permukiman di Kampung Kiura menunjukkan karakter menyebar dan mengikuti perkembangan jaringan jalan serta kondisi lingkungan pesisir. Permukiman tidak terpusat pada satu titik, tetapi tersebar memanjang mengikuti jalur jalan utama kampung serta jembatan kayu yang menghubungkan antar rumah dan akses menuju dermaga. Pola ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi lahan dataran rendah dan rawa, sekaligus mengikuti struktur ruang kampung yang terbentuk secara alami di sepanjang garis pantai dan alur sungai.

Secara administratif, permukiman saat ini terbagi tujuh RT yang membentuk zona permukiman tertentu. Pembagian ini tidak hanya berfungsi untuk pengelolaan wilayah, tetapi juga mencerminkan kedekatan sosial dan

keterikatan kekerabatan masyarakat dalam satu wilayah kecil. Zonasi permukiman ini memudahkan pengaturan tata ruang, distribusi pelayanan publik, serta pengelolaan fasilitas umum.

Jarak antar rumah umumnya berkisar 2-10 meter, tergantung pada kondisi lahan, kepadatan keluarga, dan ketersediaan ruang di sekitar jalur jalan atau jembatan. Jarak yang relatif dekat mencerminkan pola hubungan sosial yang erat sekaligus menunjukkan penyesuaian terhadap lahan rawa yang terbatas. Sebagian besar rumah dibangun dalam bentuk rumah panggung, yang memungkinkan masyarakat mengatasi genangan air pasang dan kondisi permukaan tanah yang lembek.

Hubungan permukiman dengan fasilitas umum cukup kuat, terutama terhadap akses jalan dan jaringan listrik. Jalan utama kampung yang terbuat dari jalan beton menjadi sumbu pergerakan masyarakat dan berfungsi menghubungkan zona permukiman dengan Kampung tetangga. Sementara itu, jaringan listrik telah menjangkau sebagian besar rumah, meskipun masih bergantung pada pasokan terbatas dari sumber tenaga yang tersedia (*diesel*).

Pola permukiman menyebar mengikuti jalur jalan dan jembatan ini



Penyebaran rumah pada jalur jembatan (dok.ippm)

menunjukkan bahwa perkembangan ruang kampung sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta kebutuhan masyarakat untuk tetap berdekatan dengan jalur mobilitas utama dan sumber mata pencaharian di pesisir dan sungai.

Pola ini sekaligus mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Kiura yang terbentuk secara organik dan adaptif terhadap dinamika alam. Kedekatan masyarakat dengan lingkungan pesisir dan sungai membentuk cara hidup yang saling bergantung, baik dalam aktivitas ekonomi maupun dalam hubungan sosial sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kekerabatan menjadi landasan utama dalam mengelola sumber daya alam serta menghadapi berbagai tantangan lingkungan.

3. Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah di Kampung Kiura menunjukkan variasi sesuai kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat. Sebagian besar keluarga menghuni rumah milik sendiri, baik yang dibangun secara swadaya maupun hasil dukungan keluarga besar. Namun demikian, masih terdapat sejumlah warga yang menumpang di rumah keluarga atau kerabat karena keterbatasan lahan dan kemampuan membangun rumah baru. Di samping itu, sebagian kecil masyarakat tinggal di rumah sewa atau kontrak, meskipun praktik ini tidak terlalu umum dalam struktur sosial kampung.

Pemerintah dan pihak swasta juga berperan penting melalui penyediaan bantuan rumah, seperti program YPMAC maupun Pemerintah melalui dukungan Dana Desa yang membantu perbaikan maupun pembangunan hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah. Rumah-rumah bantuan ini menjadi tumpuan penting untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.

4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar

Berdasarkan hasil pendataan bangunan rumah masyarakat di Kampung Kiura, sebagian besar unit hunian merupakan rumah panggung berbahan kayu yang dibangun melalui program bantuan pemerintah dan YPMAC. Hunian yang tersebar di wilayah pemukiman kampung pada umumnya memiliki tipe bangunan 36-66, dengan luas lahan rata-rata berkisar antara 60-96 meter persegi. Kondisi ini mencerminkan karakteristik pemukiman pesisir yang padat.

Setiap bangunan rumah pada tipe ini umumnya memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, ruang dapur, serta satu kamar mandi. Pembagian ruang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dasar keluarga dan pola hunian masyarakat yang sebagian besar masih hidup dalam struktur keluarga besar. Dalam praktiknya, beberapa rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga, sehingga fungsi ruang sering kali dimanfaatkan secara bersama.

Secara umum, konfigurasi bangunan dan jumlah ruang yang tersedia telah mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas bangunan dan penataan ruang agar lebih memenuhi standar rumah sehat. Beberapa rumah masih memiliki keterbatasan pada aspek ventilasi,

pencahayaannya alami, serta penggunaan material bangunan yang kurang tahan terhadap kondisi lingkungan pesisir. Upaya perbaikan dan rehabilitasi rumah secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan hunian sekaligus mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga

Ketersediaan fasilitas dasar rumah tangga di Kampung Kiura menunjukkan kondisi layanan dasar yang masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh warga. Berdasarkan hasil survei lapangan, fasilitas air bersih, sanitasi, penerangan, pengelolaan sampah, serta sistem drainase masih perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

a. Akses air bersih

Sumber air bersih utama masyarakat berasal dari sumur galian, sungai, serta penampungan air hujan. Tercatat terdapat beberapa sumur galian dan 5 unit profil tank penampung air hujan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan memasak. Ketersediaan air bersih yang sangat terbatas, warga masih bergantung pada air sungai yang kualitasnya tidak selalu terjamin. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana air bersih masih belum memadai, terutama untuk kebutuhan harian rumah tangga.

b. Sistem sanitasi

Sistem sanitasi masyarakat tergolong beragam, mulai dari jamban keluarga, septic tank, hingga jamban tidak sehat. Terdapat 2 unit WC umum, yang kondisinya rusak dan tidak terawat. Banyak rumah tangga masih melakukan kegiatan buang air di hutan atau tepi sungai. Kebiasaan ini menjadi ancaman bagi kesehatan lingkungan karena meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Minimnya sarana sanitasi layak menunjukkan bahwa pembangunan jamban sehat dan edukasi perilaku hidup bersih masih sangat dibutuhkan.

c. Penerangan dan akses listrik

Kampung Kiura memperoleh pasokan listrik dari PLN tenaga diesel, namun belum menjangkau seluruh rumah tangga secara merata. Kebutuhan listrik masih mengandalkan genset. Keterbatasan jam operasi dan kapasitas listrik berdampak pada aktivitas rumah tangga di malam hari serta penggunaan

peralatan rumah tangga maupun fasilitas umum. Kondisi ini mengindikasikan perlunya infrastruktur energi yang lebih andal dan berkesinambungan.

d. Pengelolaan sampah rumah tangga

Pengelolaan sampah belum berjalan secara sistematis. Sampah rumah tangga umumnya dibuang sembarangan di sekitar pemukiman atau ke sungai. Tidak tersedianya sistem pengumpulan sampah, tempat pembuangan sementara, maupun fasilitas pengangkutan membuat pemukiman mudah kotor dan berpotensi memicu penyakit. Minimnya kesadaran warga mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah semakin memperparah kondisi lingkungan.

e. Sistem drainase rumah tangga

Kondisi drainase di pemukiman Kampung Kiura tergolong rawan genangan, terutama pada musim hujan dan saat terjadi banjir rob. Air pasang laut kerap masuk ke wilayah pemukiman dan merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan kayu. Tidak adanya saluran drainase yang terbangun dengan baik membuat aliran air tidak terkelola dan menyebabkan genangan di sekitar rumah, yang berpotensi memicu perkembangbiakan nyamuk serta mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, fasilitas dasar rumah tangga di Kampung Kiura masih berada pada kategori terbatas. Ketersediaan air bersih belum stabil, sanitasi belum layak bagi sebagian besar rumah tangga, listrik tidak merata, sampah belum dikelola secara memadai, dan sistem drainase belum berfungsi baik. Kondisi ini menuntut peningkatan infrastruktur dasar secara bertahap, serta penguatan edukasi masyarakat untuk mendorong perilaku hidup bersih dan lingkungan sehat.

6. Kondisi Lingkungan Permukiman

Lingkungan permukiman Kampung Kiura menunjukkan karakteristik khas kawasan pesisir dengan kondisi permukiman yang sederhana, aksesibilitas yang terbatas, serta tingkat kerentanan lingkungan yang cukup tinggi terhadap bencana alam. Secara umum, kondisi fisik permukiman belum sepenuhnya memenuhi standar lingkungan hunian sehat, baik dari aspek kebersihan, infrastruktur dasar, maupun keamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan intervensi pembangunan yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas lingkungan

permukiman secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi sosial dan budaya setempat.

a. Kebersihan lingkungan sekitar rumah

Kebersihan lingkungan di sekitar rumah warga masih menjadi persoalan utama. Sebagian besar sampah rumah tangga belum dikelola secara baik dan cenderung dibuang begitu saja di sekitar permukiman atau ke sungai. Tidak terdapatnya fasilitas tempat pembuangan sampah serta tidak adanya sistem pengangkutan, membuat tumpukan sampah mudah ditemukan di area permukiman. Kondisi ini tidak hanya menurunkan keindahan lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran dan penyakit, terutama di musim hujan ketika genangan air mempercepat perkembangan vektor penyakit seperti nyamuk.

b. Akses jalan menuju rumah

Akses jalan menuju permukiman warga masih bersifat sederhana dan terbatas. Jalan utama kampung menggunakan jalan beton, namun banyak yang



telah rusak akibat banjir rob tahunan yang menggenangi kawasan permukiman secara rutin. Sementara itu, akses menuju rumah-rumah warga umumnya berupa jembatan papan kayu yang menghubungkan rumah panggung satu dengan

lainnya. Kondisi jembatan kayu tersebut sebagian besar sudah lapuk dan mengalami kerusakan di banyak titik, sehingga menghambat mobilitas warga dan menimbulkan risiko keselamatan. Infrastruktur jalan yang belum memadai ini berdampak pada keterbatasan aktivitas harian masyarakat, terutama saat cuaca buruk.

c. Risiko bencana: banjir, abrasi dan pohon tumbang

Permukiman Kampung Kiura berada di wilayah pesisir yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Banjir rob dan gelombang tinggi sering terjadi, terutama pada musim timur dan musim hujan, sehingga air laut kerap masuk hingga ke area permukiman dan merusak infrastruktur kampung.

Selain banjir rob, abrasi pantai juga muncul di sejumlah titik akibat hempasan gelombang laut yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Di samping itu potensi pohon tumbang tetap ada, terutama pada saat angin laut berhembus kencang.

d. Keberadaan Halaman dan Pekarangan

Sebagian besar rumah di Kampung Kiura tidak memiliki pekarangan yang jelas. Banyak rumah tidak dilengkapi pagar, dan halaman rumah cenderung terbatas atau tidak ada sama sekali. Dalam beberapa kasus, ruang di sekitar rumah hanya berupa akses lalu lintas atau area sempit yang langsung berbatasan dengan jembatan kayu dan jalan. Kondisi ini mengurangi aktivitas rumah tangga seperti menjemur atau berkebun. Selain itu, ketiadaan pagar membuat batas kepemilikan lahan tidak tampak jelas dan mempengaruhi aspek keamanan maupun privasi.

Kondisi lingkungan permukiman Kampung Kiura masih menghadapi tantangan besar, terutama pada aspek kebersihan, keterampilan pengelolaan lingkungan, serta kelayakan infrastruktur permukiman. Akses jalan yang terbatas, risiko bencana pesisir yang tinggi, dan minimnya halaman pekarangan menunjukkan perlunya penataan permukiman yang lebih terstruktur dan mitigasi bencana yang komprehensif. Perbaikan sarana dasar permukiman dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah kunci dalam mewujudkan hunian yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

7. Masalah Utama dan Kebutuhan Perumahan

Kondisi perumahan di Kampung Kiura masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Rumah-rumah yang sebagian besar merupakan bangunan panggung berbahan kayu menunjukkan keterbatasan dari aspek kelayakan struktur, sanitasi, hingga keamanan lingkungan. Analisis berikut merangkum permasalahan utama perumahan dan kebutuhan penanganan yang harus diprioritaskan.

Permasalahan perumahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fisik hunian, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan, kenyamanan, dan rasa aman penghuninya. Kondisi sanitasi yang belum memadai, keterbatasan akses air bersih, serta kerentanan bangunan terhadap cuaca ekstrem menjadi faktor yang memperbesar risiko lingkungan bagi keluarga. Oleh karena itu, perbaikan

perumahan perlu dipandang sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Kiura secara menyeluruh.

a. Banyak rumah tidak layak huni (RTLH)

Permukiman Kampung Kiura didominasi rumah panggung dari kayu yang dibangun sederhana dan telah mengalami kerusakan pada sejumlah bagian.



Terdapat banyak rumah masyarakat tidak layak huni dan tidak memadai dari segi kualitas bangunan maupun kenyamanan tinggal. Kerusakan seperti lantai kayu lapuk, dinding rapuh, serta atap bocor sering ditemukan. Keterbatasan perawatan

dan minimnya kemampuan ekonomi warga menyebabkan kondisi rumah sulit diperbaiki, sehingga meningkatkan risiko keselamatan penghuni.

b. Kelebihan penghuni per rumah (*Overcrowding*)

Salah satu persoalan signifikan yang dihadapi masyarakat adalah terjadinya kelebihan penghuni dalam satu rumah (*overcrowding*), yang umumnya muncul karena keterbatasan jumlah unit perumahan yang tersedia di kampung. Kondisi ini mendorong beberapa keluarga, bahkan lebih dari satu kepala keluarga, untuk tinggal bersama dalam satu unit rumah yang luas dan fasilitasnya terbatas. Dalam banyak kasus, satu rumah dihuni oleh keluarga inti, keluarga anak yang sudah menikah, serta kerabat dekat lainnya, sehingga kepadatan hunian tidak dapat dihindari.

Situasi *overcrowding* ini berdampak langsung pada menurunnya kenyamanan dan kualitas hidup penghuni rumah, terutama terkait privasi, sirkulasi udara, dan kebersihan lingkungan dalam rumah. Selain itu, kepadatan hunian meningkatkan risiko penularan penyakit menular, khususnya penyakit berbasis lingkungan dan sanitasi, karena penggunaan ruang dan fasilitas dilakukan secara bersama-sama. Keterbatasan ruang juga membatasi aktivitas anak-anak untuk belajar dan bermain secara layak, serta mengurangi rasa aman dan kenyamanan perempuan dalam menjalankan aktivitas domestik sehari-hari.

d. Minim akses air bersih dan sanitasi layak

Masalah perumahan juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses air bersih dan sarana sanitasi. Terdapat 2 unit WC umum, dengan kondisi rusak, dan



sebagian besar rumah tangga masih melakukan aktivitas buang air di hutan atau tepi sungai. Sumber air bersih keluarga juga sangat terbatas pada penampungan air hujan dan sumur galian yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan harian

masyarakat. Kondisi ini memperparah dampak hunian tidak layak dan meningkatkan risiko kesehatan, terutama ISPA, diare, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya.

e. Lokasi perumahan yang berisiko banjir dan abrasi

Lokasi permukiman berada di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, terutama banjir rob, gelombang tinggi, dan abrasi pantai. Setiap tahun air laut kerap masuk ke permukiman dan merusak infrastruktur, termasuk jalan beton dan jembatan kayu penghubung rumah warga. Rumah-rumah panggung yang berdiri dekat pesisir dan sungai menjadi semakin rentan mengalami kerusakan struktural. Kondisi lingkungan ini menandakan perlunya pendekatan mitigasi bencana dalam perencanaan dan penataan kembali permukiman.

f. Kurangnya bantuan perumahan dari pemerintah atau dana desa

Meskipun terdapat beberapa bantuan perumahan dari pemerintah pada masa lalu, jumlahnya belum mampu mengatasi kebutuhan hunian layak bagi seluruh masyarakat. Sebagian warga masih bergantung pada rumah bantuan lama, namun perbaikan lanjutan tidak tersedia secara memadai dan alokasi bantuan perumahan dari dana desa masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan dukungan ini memperlambat upaya peningkatan kualitas rumah dan penyediaan unit baru untuk mengatasi *overcrowding*.

C. Kependudukan

1. Suku-suku di Kampung

a. Suku/marga asli

Penduduk asli Kampung Kiura berasal dari dua kelompok marga besar, yaitu Suku Ope dan Suku Tani, yang secara adat merupakan kelompok utama yang telah mendiami wilayah ini sejak masa leluhur. Dalam struktur adat setempat, kedua kelompok ini dikenal sebagai dua *taparu* atau marga besar yang berfungsi sebagai payung genealogis bagi marga-marga kecil di bawahnya. Keberadaan dua suku besar ini menjadi fondasi identitas sosial dan budaya masyarakat Kampung Kiura hingga saat ini.

Sistem kekerabatan masyarakat menganut pola patrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui pihak laki-laki. Hal ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pewarisan hak ulayat, kepemimpinan adat, dan penerusan nama marga. Anak laki-laki mewarisi marga ayah, sedangkan perempuan yang menikah mengikuti sistem kekerabatan keluarga suami. Struktur patrilineal ini memberikan peran penting bagi laki-laki sebagai penjaga garis keturunan dan penanggung jawab wilayah adat keluarga.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sebaran marga di Kampung Kiura tidak dibedakan secara spasial. Rumah-rumah adat maupun permukiman tidak mengelompok berdasarkan marga tertentu, melainkan menyebar secara merata di seluruh wilayah kampung. Pola permukiman yang bercampur ini menunjukkan tingginya tingkat integrasi sosial antar marga dan kuatnya rasa kebersamaan dalam masyarakat. Meskipun setiap marga tetap memegang identitas dan peran adat masing-masing, kehidupan sehari-hari berlangsung harmonis tanpa batas fisik maupun sosial antar kelompok marga.

Kondisi ini menggambarkan bahwa identitas adat masyarakat Kiura tidak hanya berakar pada garis keturunan, tetapi juga pada nilai kebersamaan, solidaritas, dan keterbukaan yang telah terbangun sejak lama. Peran lembaga adat yang menaungi kedua marga besar Taniyarepimara dan Opeyarepimara semakin memperkuat kesatuan sosial dalam kampung, sehingga kohesi masyarakat tetap terjaga baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelesaian persoalan adat.

b. Suku pendatang

Sejak tahun 1980-an, Kampung Kiura mulai dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah seperti Kei, Bugis, Jawa, dan Ternate. Mereka datang dengan beragam latar belakang pekerjaan, mulai dari pedagang, guru, hingga tenaga kesehatan dan secara perlahan menetap serta menjadi bagian dari kehidupan sosial kampung. Kehadiran mereka memberi warna baru dalam dinamika masyarakat pesisir Kiura, terutama melalui kontribusi dalam sektor ekonomi dan pelayanan dasar.

Integrasi para pendatang berlangsung secara alami melalui interaksi sehari-hari, kerja sama dalam aktivitas ekonomi, serta partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Meskipun tetap menjaga identitas budaya masing-masing, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Kamoro dan terlibat dalam praktik sosial kampung seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Proses ini membuat mereka diterima sebagai bagian dari komunitas yang turut memperkuat struktur sosial Kampung Kiura.

c. Peran sosial masing-masing kelompok etnis

Kehidupan sosial di Kampung Kiura ditandai oleh hubungan antaretnis yang harmonis dan saling mendukung. Suku Kamoro, sebagai kelompok etnis mayoritas, memegang peran sentral dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Mereka menjadi penggerak utama dalam pemerintahan kampung, struktur adat, kegiatan ekonomi tradisional, dan kegiatan keagamaan. Nilai-nilai adat Kamoro juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan penting, termasuk pengelolaan sumber daya alam serta penyelesaian konflik sosial.

Selain Kamoro, terdapat kelompok etnis pendatang, khususnya suku Bugis dan beberapa etnis lain yang telah bermukim di Kiura sejak tahun 1980-an. Kelompok ini berperan aktif dalam mengisi kebutuhan tenaga profesional seperti pedagang, guru, dan tenaga kesehatan. Mereka turut memperkuat struktur ekonomi kampung melalui aktivitas perdagangan dan memberikan kontribusi penting dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, peran mereka sangat strategis dalam mendukung kelangsungan layanan dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, keterlibatan seluruh kelompok etnis baik masyarakat Kamoro maupun pendatang dalam pemerintahan kampung, lembaga adat, aktivitas

ekonomi, serta kegiatan keagamaan berlangsung sangat baik. Kolaborasi lintas etnis ini memperkuat kohesi sosial dan memastikan bahwa pembangunan kampung berjalan secara inklusif, partisipatif, serta mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat di Kampung Kiura.

d. Relasi sosial

Relasi sosial di Kampung Kiura berlangsung harmonis dan mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan antar suku. Kehidupan sehari-hari masyarakat ditandai oleh gotong royong, saling membantu dalam kegiatan adat, keagamaan, serta aktivitas ekonomi seperti menjaring ikan atau mencari hasil hutan. Pola interaksi sosial antar suku baik suku Kamoro sebagai kelompok utama maupun pendatang terjalin dengan baik dan saling menghargai.

Hubungan sosial yang inklusif ini menjadi kekuatan utama masyarakat dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan persoalan bersama, dan mendukung pembangunan kampung secara kolektif. Nilai kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong masih dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi ini menciptakan rasa aman, saling percaya, serta memperkuat partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan kampung.

2. Nilai dan Kearifan Lokal

a. Norma adat dan sistem sosial

Kehidupan masyarakat Kampung Kiura sangat dipengaruhi oleh aturan adat yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Norma adat mengatur berbagai aspek sosial, mulai dari tata cara pernikahan, kedukaan, pesta adat, hingga mekanisme penyelesaian masalah di tingkat kampung. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin tokoh adat dan wajib ditaati seluruh warga. Dalam pengelolaan sumber daya alam, adat juga mengatur pembagian wilayah ulayat, termasuk pemanfaatan dua jalur sungai utama serta penggunaan tanda sasi untuk mengatur masa larangan berburu atau mengambil hasil kebun.

Struktur adat di Kampung Kiura dipimpin oleh Kepala Suku dan Dewan Adat Kampung (DAK). Keduanya berperan sebagai penjaga nilai budaya, penentu kebijakan adat, dan mediator dalam penyelesaian perselisihan. Masyarakat adat Kiura terdiri dari dua taparu besar Taparu Taniyarepimara dan Taparu

Opeyarepimara yang menaungi beberapa marga kecil. Walaupun lembaga adat seperti Dewan Adat Kampung telah diakui perannya, struktur lembaga adat yang lebih formal masih dalam proses penguatan dan belum terbentuk sepenuhnya.

Secara keseluruhan, norma adat dan sistem sosial berjalan kokoh dan berfungsi sebagai pedoman hidup bersama, menjaga keharmonisan, serta memastikan pengelolaan lahan ulayat berlangsung adil dan sesuai tradisi leluhur. Peran tokoh adat dan tetua kampung masih sangat dihormati sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian konflik dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Musyawarah adat menjadi mekanisme utama dalam menentukan kebijakan kampung yang berkaitan dengan kepentingan bersama, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Keberlanjutan sistem ini turut memperkuat identitas budaya masyarakat Kiura di tengah pengaruh perubahan sosial dan perkembangan dari luar kampung.

b. Ritual, tradisi, dan upacara

Masyarakat Kampung Kiura masih memegang kuat berbagai ritual keagamaan dan tradisional yang diwariskan leluhur. Upacara penting seperti pernikahan adat serta peringatan 40 hari meninggal tetap dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi dan nilai kekeluargaan. Dalam setiap kegiatan adat, masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan saling mendukung, sehingga ritual tidak hanya menjadi kegiatan spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial.

Tradisi budaya juga tercermin dalam tarian dan simbol-simbol khas Kampung Kiura. Tarian adat Kamoro biasanya ditampilkan pada acara perayaan kampung, penyambutan tamu, atau pesta adat. Selain itu, makanan tradisional menjadi simbol budaya penting, terutama hidangan berbasis sagu, ikan, dan hasil hutan yang menunjukkan kedekatan masyarakat dengan lingkungan alam mereka.

Keseluruhan ritual dan tradisi ini masih dijalankan hingga sekarang dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Kiura. Pelaksanaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai leluhur, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga kampung. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam setiap prosesi adat menjadi media pewarisan budaya agar tradisi lokal tetap hidup dan berkelanjutan.

c. Pengetahuan lokal

Masyarakat Kampung Kiura memiliki pengetahuan lokal yang kuat dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan hutan, mereka menerapkan aturan adat yang melarang penebangan pohon secara sembarangan serta menetapkan tanda-tanda larangan (sasi) untuk memastikan sumber daya alam tetap terjaga. Kesadaran bahwa hutan dan sungai merupakan sumber mata pencaharian utama membuat masyarakat menjaga wilayah berburu, dusun sagu, hingga daerah sungai agar kehidupan ikan dan udang tetap berkelanjutan. Praktik-praktik ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari sistem sosial-ekologis kampung.

Seiring masuknya modernisasi, sebagian pengetahuan obat-obatan tradisional mulai jarang digunakan dan perlahan ditinggalkan. Beberapa tanaman berkhasiat yang dahulu dimanfaatkan untuk pengobatan kini tidak lagi menjadi pilihan utama, terutama karena masyarakat lebih mengandalkan fasilitas kesehatan modern di Puskesmas Kokonau. Meski demikian, nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan alam tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan hidup masyarakat di kampung Kiura.

d. Nilai-nilai dasar masyarakat

Kehidupan masyarakat Kampung Kiura dibangun di atas nilai-nilai dasar yang kuat, terutama solidaritas, kebersamaan dan gotong royong. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, masyarakat senantiasa saling membantu, mulai dari kegiatan mencari hasil laut, pekerjaan adat, hingga penyelesaian persoalan bersama. Nilai bahu-membahu dan kerjasama telah menjadi budaya turun-temurun yang menjaga keharmonisan sosial yang dimulai dari kehidupan di keluarga.

Selain itu, masyarakat memegang teguh nilai kekeluargaan serta menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada tokoh adat dan tokoh agama. Kedua figur ini menjadi panutan dalam menjaga ketertiban, memelihara tradisi, dan mendorong kehidupan spiritual masyarakat. Nilai-nilai dasar ini membentuk karakter sosial Kampung Kiura yang rukun, saling menghargai, dan kompak dalam menghadapi berbagai tantangan.

e. Bahasa lokal

Bahasa lokal tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Kiura. Dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat, bahasa asli digunakan secara konsisten sebagai alat tutur utama. Penggunaan bahasa lokal tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memperkuat identitas budaya, menjaga kedekatan antar anggota masyarakat, serta menjadi media pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perkembangan dan perubahan sosial, bahasa lokal masih hidup dan terpelihara dengan baik di Kampung Kiura. Bahasa tersebut juga digunakan dalam kegiatan adat, musyawarah kampung, dan ritual tradisional sebagai simbol penghormatan terhadap warisan leluhur. Dengan demikian, pelestarian bahasa lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan budaya dan jati diri masyarakat

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kampung Kiura pada tahun 2025 menunjukkan komposisi demografis yang relatif kecil namun stabil, mencerminkan karakter masyarakat kampung yang tumbuh secara alami melalui hubungan kekerabatan. Berdasarkan Data Agregat Dukcapil Mimika Tahun 2025, total penduduk Kampung Kiura berjumlah 424 jiwa yang tersebar dalam 94 Kepala Keluarga (KK). Jumlah ini menunjukkan rata-rata anggota keluarga yang cukup besar, yang umum dijumpai pada komunitas adat dengan pola hubungan sosial yang kuat.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki mencapai 216 jiwa (50,94%), sedangkan jumlah perempuan sebanyak 208 jiwa (49,06%). Perbandingan ini memperlihatkan dominasi populasi laki-laki yang cukup signifikan, yang pada konteks kehidupan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan peran laki-laki dalam aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Kondisi demografis yang tidak terlalu padat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi, pola permukiman, serta sistem sosial berbasis keluarga besar. Karakter ini menjadi fondasi dalam pembentukan identitas

sosial kampung serta dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi dan budaya sehari-hari. Hubungan kekerabatan yang kuat mendorong terciptanya solidaritas sosial dan saling membantu antarwarga dalam berbagai kegiatan kampung. Pola hidup komunal ini juga mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan adat, keagamaan, dan kerja bakti bersama. Selain itu, struktur sosial berbasis keluarga besar berperan dalam menjaga nilai-nilai lokal agar tetap lestari di tengah dinamika perubahan sosial.

b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi.

Distribusi penduduk Kampung Kiura menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Kiura menurut Umur Tahun 2025

No.	Interval Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	0 - 4	25	5,90
2.	5 - 9	47	11,08
3.	10 - 14	54	12,74
4.	15 - 19	57	13,44
5.	20 - 24	43	10,14
6.	25 - 29	32	7,55
7.	30 - 34	27	6,37
8.	35 - 39	28	6,60
9.	40 - 44	29	6,84
10.	45 - 49	21	4,95
11.	40 - 54	17	4,01
12.	55 - 59	7	1,65
13.	60 - 64	14	3,30
14.	65 - 69	13	3,07
15.	70 - 74	7	1,65
16.	75+	3	0,71
	Total	424	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Distribusi penduduk kampung Kiura berdasarkan Rasio beban tanggungan (*Dependency Ratio*) yaitu sebesar:

$$\frac{126 + 23}{275} \times 100 = 54,18 \text{ dibulatkan menjadi } 54$$

Sesuai dengan angka tersebut di atas, berarti DR di kampung Atapo sebesar 54, dimana setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 54 orang yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan ≥ 64 tahun). Tingginya angka rasio beban tanggungan ini merupakan factor penghambat pembangunan ekonomi di kampung Atapo, karena sebagian pendapatan yang diperoleh kelompok yang produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum atau tidak produktif.

Namun fakta menarik lain bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Dinas Dukcapil Mimika Tahun 2025 jumlah penduduk kampung Atapo yang baru terekam administrasi kependudukan e-KTP 83,64%, KTA 81,94%, KK 99,10% dan Akta Kelahiran 100%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Kiura telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga berpeluang mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan pemerintah.

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di Kampung Kiura. Indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang berhasil diselesaikan oleh masyarakat, sekaligus mencerminkan kemampuan literasi, keterampilan dasar, serta potensi partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan kampung.

Melalui distribusi tingkat pendidikan, dapat dilihat sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan belajar, pola keberlanjutan sekolah antargenerasi, serta tantangan yang dihadapi dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah kampung dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Distribusi penduduk Kampung Kiura menurut tingkat pendidikan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Atapo menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1.	Tidak/belum sekolah	82	87	169	39,86
2.	Belum Tamat SD	35	30	65	15,33
3.	Tamat SD	22	24	46	10,85
4.	SLTP	61	61	122	28,77
5.	SLTA	16	5	21	4,95
6.	Akademi/D-III	0	1	1	0,24
	Jumlah	216	208	424	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa distribusi tingkat pendidikan penduduk Kampung Kiura masih didominasi jenjang rendah, dengan 39,86 persen penduduk tidak/belum sekolah dan 15,33 persen belum tamat SD, yang menandakan masih kuatnya persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan dasar; kondisi ini diperparah 10,85 persen penduduk hanya tamat SD serta 28,77 persen yang berhenti pada jenjang SLTP, sehingga secara keseluruhan lebih dari 94 persen penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Rendahnya proporsi lulusan SLTA (4,95%) serta pendidikan vokasional Akademi/D-III (0,24%) menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas dan kejuruan masih menjadi titik lemah utama dalam sistem pendidikan daerah.

Struktur pendidikan seperti ini mencerminkan belum optimalnya capaian Wajib Belajar 9 Tahun di kampung Kiura yang secara substantif dan berpotensi membatasi kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang bonus demografi, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang terarah untuk memperkuat transisi pendidikan dasar ke menengah, memperluas akses SMA/K dan vokasi, serta mengembangkan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat.

d. Mata pencaharian/pekerjaan

Mata pencaharian penduduk Kampung Kiura mencerminkan ketergantungan masyarakat pada sumber daya pesisir dan sungai sebagai basis utama ekonomi keluarga. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan tangkap, pencari hasil laut, serta memanfaatkan hutan mangrove dan dusun sagu untuk kebutuhan hidup sehari-

hari. Selain pekerjaan utama tersebut, sebagian masyarakat juga berdagang, menjadi buruh, atau menjalankan usaha kecil untuk menambah pendapatan. Informasi mengenai mata pencaharian ini penting untuk melihat kondisi ekonomi kampung serta arah pengembangan potensi lokal ke depan.

Distribusi penduduk Kampung Kiura menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Kiura menurut Matapencaharian Tahun 2025

No.	Matapencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum Bekerja	340	80,19
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2	0,47
3.	Tenaga Pengajar	0	0,00
4.	Wiraswasta	9	2,12
5.	Petani/Pekebun	38	8,96
6.	Nelayan	35	8,35
	Jumlah	424	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Struktur mata pencaharian penduduk Kampung Kiura masih sangat bergantung pada aktivitas subsisten yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak bekerja termasuk ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa (80,19%); petani tradisional (8,96%), nelayan (8,35%), pedagang (2,12%) dan sebagai ASN (0,47%). Dominasi penduduk yang tidak bekerja mengindikasikan terbatasnya kesempatan kerja formal maupun informal. Sebagian besar yang bekerja mengandalkan aktivitas pertanian tradisional dan penangkapan ikan, yang sifatnya musiman dan sangat dipengaruhi kondisi lingkungan.

Minimnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan, menjadi faktor utama yang menjaga masyarakat tetap bergantung pada ekonomi subsisten. Pekerjaan formal seperti ASN dan pedagang jumlahnya sangat kecil, sehingga kontribusi terhadap perputaran ekonomi kampung juga terbatas.

e. Status sosial ekonomi

Sebagian besar penduduk Kampung Kiura berada pada kategori ekonomi rendah, ditandai oleh ketergantungan pada aktivitas subsisten, minimnya pendapatan tetap, serta kurangnya aset produktif. Keterbatasan lapangan kerja

dan rendahnya tingkat pendidikan memperkuat kondisi kerentanan ekonomi masyarakat.

Sarana pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih masih terbatas. Sebagian besar aktivitas ekonomi berorientasi rumah tangga, dan penggunaan teknologi masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan signifikan.

Kelompok ekonomi menengah umumnya terdiri dari keluarga yang memiliki usaha kecil seperti kios atau bekerja sebagai pedagang, sedangkan kelompok sejahtera jumlahnya sangat sedikit, ditandai oleh kepemilikan aset yang lebih baik atau akses terhadap pekerjaan formal.

f. Agama dan lembaga keagamaan

Agama merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Kampung Kiura dan berperan dalam membentuk nilai-nilai sosial serta praktik budaya sehari-hari. Kehadiran agama-agama yang dianut oleh penduduk mencerminkan sejarah perkembangan kampung serta dinamika masyarakat yang terdiri atas penduduk asli Kamoro dan sebagian kecil pendatang.

Gambaran distribusi penduduk menurut agama berikut memberikan pemahaman tentang komposisi keagamaan yang hidup dan berkembang di Kampung Kiura pada tahun 2025.

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Kiura menurut Agama Tahun 2025

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Katolik	378	89,15
2.	Protestan	18	4,25
3.	Islam	28	6,60
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	424	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kiura sangat didominasi oleh penganut Katolik yang mencapai 89,15% dari total penduduk. Dominasi ini berkaitan dengan sejarah masuknya agama Katolik sejak para misionaris Belanda mulai berkarya di Kokonau pada awal 1920-an. Sementara itu, penganut Protestan berjumlah 18 jiwa (4,25%) dan penganut Islam

berjumlah 28 jiwa (6,60%), yang sebagian besar berasal dari kelompok pendatang seperti pedagang, guru, atau tenaga kesehatan.

Kendati demikian, Kampung Kiura tidak memiliki sarana ibadah seperti gereja maupun masjid. Seluruh kegiatan keagamaan masyarakat, baik umat Katolik, Protestan, maupun Islam dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas di kampung-kampung terdekat seperti Apuri atau Kokonau, sesuai kondisi sarana pelayanan umum yang terpusat di distrik tersebut.

Ketiadaan fasilitas ibadah ini menunjukkan adanya kebutuhan pembangunan yang masih penting untuk mendukung kehidupan spiritual dan aktivitas keagamaan masyarakat. Selama ini, warga harus beribadah di kampung lain atau memanfaatkan ruang sederhana di rumah warga untuk kegiatan keagamaan bersama. Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan agar fasilitas ibadah dapat dibangun secara bertahap dan sesuai kebutuhan umat.

Secara keseluruhan, komposisi agama yang relatif homogen tetap mencerminkan kehidupan sosial yang harmonis. Nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat berperan penting dalam membina kebersamaan, memperkuat adat, serta menjadi dasar dalam kegiatan kemasyarakatan di Kampung Kiura.

4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk di Kampung Kiura merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang bertumpu pada jaringan sosial, aktivitas ekonomi tradisional, serta ikatan kekerabatan dengan kampung-kampung di sekitarnya. Jalur transportasi air melalui sungai dan laut menjadi akses utama yang memungkinkan pergerakan penduduk berlangsung relatif lancar, baik untuk mobilitas harian maupun temporer. Sebagian besar perpindahan penduduk tidak bersifat menetap, melainkan sementara, sehingga tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap struktur dan komposisi demografi kampung.

Pola mobilitas ini umumnya dipengaruhi oleh mata pencaharian sebagai nelayan dan pencari hasil laut, kegiatan adat dan sosial-budaya, serta partisipasi dalam aktivitas keagamaan yang sering dilaksanakan di kampung lain. Selain itu, keterbatasan fasilitas dasar di Kampung Kiura turut mendorong mobilitas penduduk, khususnya dalam

memenuhi kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas perdagangan yang mengharuskan warga melakukan perjalanan ke pusat distrik, kampung tetangga, maupun ke Kota Timika.

Mobilitas keluar-masuk penduduk Kampung Kiura juga berlangsung secara aktif sebagai bagian dari hubungan kekerabatan yang kuat antar wilayah, baik dalam bentuk kunjungan keluarga, keperluan adat, perkawinan, maupun berbagai aktivitas sosial dan keagamaan lainnya. Hubungan ini tidak hanya mempererat ikatan sosial antar kampung, tetapi juga menjadi sarana pertukaran informasi, dukungan moral, serta bantuan ekonomi antar anggota keluarga yang tinggal di lokasi berbeda.

Secara umum, pola migrasi dan mobilitas penduduk Kampung Kiura bersifat adaptif terhadap kondisi geografis pesisir dan keterbatasan infrastruktur, di mana akses utama melalui jalur air menjadikan perpindahan penduduk relatif fleksibel meskipun bergantung pada cuaca dan ketersediaan transportasi. Selain itu, mobilitas ini mencerminkan strategi masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidup, seperti mencari pekerjaan, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi di dalam kampung.

a. Mobilitas masuk antar kampung

Pergerakan penduduk dari kampung lain menuju Kampung Kiura berlangsung secara rutin, terutama karena letak kampung yang berdekatan dengan Atapo, Mimika, Migiwia, Kokonau dan Apuri. Ketiadaan fasilitas layanan seperti sekolah dan puskesmas di Kiura membuat masyarakat kampung lain yang melintas atau berkunjung sering memanfaatkan Kiura sebagai titik transit sebelum menuju Kokonau atau Timika.

Pendatang yang masuk ke Kiura umumnya berasal dari kampung tetangga atau dari Kota Timika dengan tujuan menghadiri kegiatan adat, mengunjungi keluarga, atau terlibat dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan program pembangunan. Mobilitas masuk ini tetap berskala kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap struktur sosial maupun kultur masyarakat, yang masih kuat berlandaskan adat dan hubungan kekerabatan Kamoro.

b. Migrasi Keluar

Penduduk Kampung Kiura melakukan migrasi keluar menuju wilayah perkotaan, terutama ke Kota Timika, dengan tujuan yang beragam dan bersifat adaptif terhadap kebutuhan hidup rumah tangga. Sebagian warga memilih menetap dalam jangka waktu yang relatif lama di kota, terutama untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal maupun informal, seperti buruh pelabuhan, jasa, perdagangan, dan sektor pendukung lainnya, serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang tidak tersedia di kampung. Di sisi lain, terdapat pula penduduk yang melakukan mobilitas sementara, yakni berpindah ke kota atau kampung lain dalam waktu singkat untuk mengunjungi keluarga, mengikuti kegiatan pemerintahan, mengurus administrasi, memperoleh pelayanan kesehatan, maupun menghadiri kegiatan sosial dan keagamaan, sebelum kembali ke Kampung Kiura.

Pola migrasi keluar ini tidak hanya berdampak pada individu yang bermigrasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kampung melalui pengiriman uang atau remitan dari anggota keluarga yang berada di kota. Remitan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, mendukung kegiatan adat dan keagamaan, serta membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat kampung.

c. Mobilitas harian dan berkala

Sebagian penduduk Kiura melakukan mobilitas keluar menuju Kokonau atau Timika untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, layanan kesehatan, maupun menjual hasil tangkapan ikan dan kepiting. Kepergian ini bersifat sementara, dan sebagian besar penduduk kembali ke kampung setelah kebutuhan mereka terpenuhi. Namun beberapa rumah tangga memiliki anggota keluarga yang menetap lebih lama di kota untuk bekerja atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP dan SMA yang memang tidak tersedia di Kiura.

Migrasi keluar ini memberikan nilai ekonomi tersendiri melalui kiriman uang (remitan) dari anggota keluarga yang bekerja di kota, yang membantu mendukung kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan adat di kampung. Meskipun demikian, migrasi keluar tidak mengubah komposisi etnis masyarakat Kiura yang tetap didominasi oleh Suku Kamoro.

d. Dinamika Komposisi Penduduk

Meskipun terdapat mobilitas masuk, keluar, dan perjalanan harian yang cukup dinamis, komposisi penduduk Kampung Kiura secara umum tetap stabil. Jumlah penduduk tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan karakter sosial kampung tetap kuat sebagai komunitas adat Kamoro yang terikat pada nilai-nilai tradisional dan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tidak ada arus migrasi besar dari luar yang mengubah struktur demografi kampung, dan sebagian kecil pendatang yang menetap sejak tahun 1980-an (misalnya dari suku Bugis) telah berbaur dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, mobilitas yang terjadi di Kiura merupakan bagian dari rutinitas sosial ekonomi masyarakat pesisir dan tidak menimbulkan perubahan struktural dalam rencana pembangunan dan pelayanan dasar kampung.

D. Pendidikan

Secara umum, masyarakat memandang pendidikan sebagai aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan dorongan orang tua yang memiliki harapan sangat tinggi agar anak-anak mereka dapat menempuh pendidikan hingga tingkat SMA atau yang lebih tinggi, bahkan meraih pekerjaan yang mapan, terutama menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai simbol perubahan sosial dan peningkatan status ekonomi keluarga. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat mengakses pendidikan secara optimal. Situasi ini terlihat pada tingginya jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan rendahnya lulusan SMA serta pendidikan tinggi.

Walaupun sebagian orang tua masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pendampingan akademik, mereka tetap berusaha memberikan bentuk dukungan yang paling memungkinkan. Dukungan tersebut tampak dalam pengaturan waktu anak, pengawasan agar anak tetap bersekolah, serta memastikan anak mengikuti kegiatan pembelajaran secara konsisten. Orang tua juga berperan sebagai motivator, memberikan semangat ketika anak menghadapi kesulitan belajar.

Generasi muda di Kampung Kiura kini menunjukkan perubahan pandangan yang signifikan terhadap pendidikan. Jika sebelumnya sekolah belum menjadi prioritas utama karena masyarakat lebih bergantung pada keterampilan tradisional, kini semakin banyak

anak dan remaja yang memahami bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan. Mereka melihat sekolah sebagai jalan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, terutama menjadi PNS yang dianggap membawa perubahan sosial dan kesejahteraan keluarga.

Pergeseran ini mencerminkan berkembangnya nilai lokal yang menempatkan pendidikan sebagai investasi penting bagi kemajuan diri dan kampung. Dukungan keluarga dan tokoh adat turut memperkuat kesadaran generasi muda bahwa menyelesaikan pendidikan menjadi modal utama menuju kehidupan yang lebih baik.

Di Kampung Kiura, muncul tantangan baru ketika sejumlah lulusan SMA bahkan sarjana tidak mendapatkan pekerjaan. Padahal, pendidikan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki masa depan keluarga. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan serta berpotensi menurunkan motivasi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan. Tantangan ini menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian agar peningkatan kualitas SDM tidak terhambat.

Akses masyarakat Kampung Kiura terhadap layanan pendidikan dasar tergolong cukup baik. Jarak menuju PAUD, SD, SMP dan SMA yang berada di kampung-kampung sekitar relatif dekat sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki. PAUD terdapat di Kampung Apuri, SD terdapat di Kampung Atapo dan Apuri, SMP di Apuri, sedangkan SMA di Kampung Kokonau. Kondisi ini memudahkan anak-anak untuk berangkat sekolah setiap hari tanpa memerlukan transportasi khusus, dan sangat membantu keluarga dalam memastikan kehadiran anak di sekolah tetap terjaga.

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit, dan Penyakit

a. Pemaknaan “sehat” menurut masyarakat

Bagi masyarakat Kampung Kiura, kesehatan dipahami terutama sebagai kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Seseorang dianggap sehat apabila masih mampu bekerja, pergi ke kebun, mendayung perahu, menangkap ikan, atau mengerjakan pekerjaan rumah serta tugas ekonomi keluarga. Selama tidak ada keluhan fisik yang mengganggu aktivitas, kondisi tersebut dipersepsikan sebagai sehat. Cara pandang ini menunjukkan pemahaman kesehatan yang bersifat fungsional, selama tubuh masih bisa bergerak dan berperan dalam kehidupan keluarga, maka dianggap sehat.

Dalam hal kesehatan ibu dan anak, masyarakat memandang kehamilan sebagai proses alamiah yang pasti berlangsung selama “sembilan bulan sepuluh hari” hingga melahirkan. Karena dianggap wajar dan tidak membutuhkan penanganan medis khusus, sebagian ibu jarang melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas atau ke tenaga kesehatan. Minimnya kunjungan antenatal ini menyebabkan kondisi ibu hamil dan perkembangan janin kurang terpantau. Pandangan tersebut juga berdampak pada status gizi anak. Bayi yang lahir dengan berat rendah atau balita kurang gizi sering dianggap tidak bermasalah selama mereka tetap aktif bergerak dan bermain. Artinya, gejala kurang gizi tidak selalu dilihat sebagai isu kesehatan serius karena penilaian kesehatan lebih didasarkan pada kemampuan anak beraktivitas, bukan indikator medis atau pertumbuhan fisik.

b. Pemaknaan “sakit”

Masyarakat Kampung Kiura memaknai penyakit melalui dua sudut pandang utama, yakni gangguan fisik dan gangguan yang berkaitan dengan aspek spiritual atau adat. Kedua perspektif ini memengaruhi cara mereka mengenali gejala serta menentukan langkah penyembuhan. Penyakit fisik dipahami sebagai kondisi yang timbul akibat faktor lingkungan atau pola hidup sehari-hari. Keluhan umum yang sering dialami meliputi demam atau rasa lemas akibat malaria, batuk karena debu, serta luka akibat aktivitas di kebun, sungai, atau hutan. Jenis penyakit seperti ini dianggap hal biasa dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya ditangani dengan cara sederhana sebelum memutuskan mencari bantuan tenaga kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat juga mempercayai adanya penyakit yang bersumber dari faktor spiritual atau akibat pelanggaran terhadap aturan adat. Dalam keyakinan lokal, gangguan kesehatan dapat muncul karena ulah roh, ketidakharmonisan dengan alam, atau tindakan yang dianggap melanggar norma adat. Dalam situasi seperti ini, warga biasanya meminta pertolongan tokoh adat atau tokoh agama, baik sebelum maupun bersamaan dengan pengobatan medis.

Ciri-ciri awal seseorang dianggap sakit biasanya dikenali melalui perubahan kondisi tubuh yang tidak lazim. Demam disertai rasa panas-dingin sering dikaitkan dengan “angin lewat” atau “angin jahat”, sedangkan lelah atau pusing dipahami sebagai akibat “salah jalan”, yaitu melewati tempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan tertentu. Pemahaman ini membuat keluarga cenderung melakukan

penanganan tradisional terlebih dahulu layaknya seperti pijat, ramuan, atau ritual ringan, sebelum membawa penderita ke puskesmas.

2. Kesehatan

a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan

Akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kampung Kiura masih sangat minim. Puskesmas hanya berada di pusat distrik, sementara fasilitas dasar seperti Puskesmas Pembantu, Poskesdes tidak tersedia di kampung. Satu-satunya layanan kesehatan yang dapat dijangkau warga di tingkat lokal adalah Posyandu, yang menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi balita dan ibu hamil. Namun layanan Posyandu juga berjalan terbatas karena kunjungan tenaga kesehatan hanya dilakukan sekali setiap bulan dan sangat bergantung pada kehadiran petugas Puskesmas dari distrik.

b. Tenaga Kesehatan yang Tersedia

Tenaga kesehatan yang melayani warga berasal dari Puskesmas di tingkat distrik, terdiri atas perawat, bidan, dan tenaga gizi. Dokter umum juga tersedia di puskesmas, sehingga pemeriksaan dan penanganan medis, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, dapat dilakukan di sana. Kehadiran tenaga kesehatan di Kampung Kiura bersifat tidak tetap dan hanya berlangsung sesuai jadwal kunjungan bulanan bersamaan dengan kegiatan posyandu.

Kondisi ini menjadi tantangan besar, terutama ketika muncul kasus sakit mendadak atau keadaan darurat. Terbatasnya sarana transportasi membuat pelayanan kesehatan belum dapat berjalan optimal. Banyak ibu hamil baru mencari pertolongan medis ketika kondisinya sudah gawat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi. Angka persalinan di fasilitas kesehatan rendah karena sebagian ibu memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun kampung. Dari pengamatan lapangan, kasus stunting dan anemia pada ibu hamil diperkirakan sudah terjadi di Kampung Kiura, namun belum ada pengukuran maupun pemantauan status gizi yang dilakukan secara teratur karena kegiatan posyandu yang tidak optimal.

3. Gizi

a. Akses pangan bergizi

Akses masyarakat Kampung Kiura terhadap makanan bergizi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam di sekitar tempat tinggal.

Kebutuhan protein hewani sebagian besar dipenuhi dari hasil tangkapan sungai seperti ikan, udang, dan kepiting yang dapat diperoleh dengan mudah dan tanpa biaya. Sementara itu, sumber protein hewani yang harus dibeli, seperti ayam dan telur, jarang dikonsumsi karena harganya tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, warga lebih banyak mengandalkan bahan pangan lokal seperti sagu dari dusun sagu, ubi dari lahan kering, serta sayuran hutan yang tersedia secara musiman. Namun, ragam konsumsi ini masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang secara optimal.

Masyarakat Kiura sangat bergantung pada beras yang diperoleh melalui bantuan pemerintah. Ketergantungan ini menunjukkan ketahanan pangan keluarga masih lemah, terutama ketika bantuan tidak datang secara rutin atau akses transportasi menuju Timika mengalami kendala. Situasi tersebut berdampak pada pola makan harian yang sederhana dan kurang beragam, terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang memerlukan asupan gizi lebih baik.

b. Program gizi di kampung

Pelaksanaan layanan gizi di Kampung Kiura masih terbatas oleh berbagai kendala. Posyandu balita yang seharusnya menjadi pusat pelayanan gizi belum dapat menjalankan sistem lima meja secara maksimal karena minimnya tenaga terlatih serta kurangnya fasilitas pendukung. Kegiatan penimbangan berat badan memang tetap dilakukan pada setiap jadwal posyandu, tetapi tingkat kehadiran masih rendah karena tidak semua ibu datang secara rutin membawa anak mereka. Kendati demikian, kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) umumnya tetap berlangsung apabila tersedia bahan pangan atau ada bantuan dari petugas kesehatan. Jenis PMT yang diberikan biasanya sederhana, menyesuaikan dengan ketersediaan pangan lokal, dan lebih berfungsi sebagai penambah energi daripada memenuhi kebutuhan gizi seimbang

c. Perilaku dan pengetahuan gizi keluarga

Pemahaman keluarga mengenai gizi di Kampung Kiura masih rendah, sehingga pola makan sehari-hari cenderung sederhana dan kurang beragam. Proses memasak tidak disesuaikan dengan kebutuhan usia; baik balita maupun orang dewasa sering mengonsumsi hidangan yang sama, umumnya berupa nasi dengan lauk tanpa tambahan sayuran. Tradisi makan bersama keluarga juga belum

terbentuk dengan kuat, dan balita biasanya disuapi ibu tanpa mempertimbangkan jumlah maupun kandungan gizi makanannya.

Di samping itu, berbagai mitos atau pantangan makanan turut mempengaruhi pola konsumsi ibu hamil. Beberapa jenis pangan seperti penyu (teteruga) yang dianggap dapat membuat kaki anak menjadi berbentuk O, udang yang dipercaya memicu cacar air, daging buaya yang dikaitkan dengan kelahiran bayi berkelenjar jari lebih, hingga tikus tanah yang diyakini menyebabkan bayi memiliki telinga panjang mendorong ibu hamil untuk menghindari sumber protein hewani tertentu. Akibatnya, asupan gizi menjadi kurang seimbang dan dapat meningkatkan risiko anemia serta gangguan pertumbuhan janin.

d. Ketersediaan sumber pangan lokal

Sumber makanan lokal di Kampung Kiura terutama berasal dari dusun sagu, yang menjadi tempat masyarakat memperoleh tepung sagu sebagai bahan pangan utama. Warga tidak memiliki kebun keluarga yang dikelola secara khusus, sehingga kebutuhan sayur-mayur dipenuhi dari hasil alam yang tersedia atau melalui pembelian dari luar kampung. Sementara itu, sumber pangan dari perairan cukup berlimpah, seperti berbagai jenis ikan sungai, udang, dan kepiting yang menjadi sumber protein utama bagi masyarakat.

Ketahanan pangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ketika terjadi pasang air besar, air dapat masuk ke rumah-rumah sehingga mengganggu kegiatan memasak maupun pengolahan sagu. Situasi tersebut sering menjadi periode rawan pangan karena tanaman sayuran tidak dapat tumbuh dengan baik di lahan yang tergenang, membuat warga harus membeli sayuran dari Kota Timika dengan harga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan lokal masih rapuh dan sangat bergantung pada musim serta akses transportasi.

4. Keluarga Berencana

a. Pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB)

Secara umum, masyarakat Kampung Kiura mengetahui bahwa program KB bertujuan mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik, terutama pada keluarga-keluarga pasangan usia subur (PUS). Banyak keluarga PUS masih memiliki banyak anak dengan jarak kelahiran yang

pendek, sehingga meningkatkan risiko kehamilan berulang dan terjadinya bayi berat lahir rendah (BBLR).

Meski sebagian pasangan usia subur telah menjadi akseptor KB, sebagian lainnya masih memandang penggunaan alat kontrasepsi kurang sesuai dengan nilai adat atau keyakinan setempat. Alat kontrasepsi dianggap sebagai “benda asing” yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan penolakan terhadap metode KB modern, terutama pada pasangan muda dan ibu yang baru melahirkan.

b. Akses terhadap layanan Keluarga Berencana

Layanan KB di Kampung Kiura hanya dapat diperoleh melalui Puskesmas Kokonau, yang menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi serta tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan melakukan pemasangan. Sarana dasar tersedia, jarak yang cukup jauh, terbatasnya kunjungan pelayanan keliling, serta rendahnya frekuensi penyuluhan menyebabkan pemanfaatan layanan KB masih kurang maksimal. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB dan tingkat penggunaannya yang masih rendah.

c. Frekuensi kelahiran dan tren keluarga

Jumlah anak dalam satu keluarga di Kampung Kiura umumnya antara 2 hingga 6 orang, mencerminkan pola keluarga besar yang masih melekat dalam budaya setempat. Dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak sebenarnya cukup baik, namun tetap dipengaruhi oleh pembagian peran gender tradisional. Ibu menanggung peran ganda sebagai pihak yang melahirkan (fungsi reproduksi) sekaligus sebagai tenaga produktif dalam rumah tangga, sedangkan laki-laki sering kali kurang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan reproduksi dan pengasuhan. Situasi ini berdampak pada dinamika keluarga dan tingginya frekuensi kelahiran, sehingga penataan ulang peran dalam keluarga serta peningkatan pemahaman tentang KB menjadi penting untuk memperkuat kualitas kesehatan ibu dan anak di Kampung Kiura.

F. Ekonomi Masyarakat

1. Aktivitas Penduduk

Pola kerja warga Kiura masih sangat bergantung pada kegiatan tradisional, terutama melaut dan menangkap ikan, udang, serta kepiting dengan peralatan

sederhana, diikuti aktivitas berkebun kecil dan mencari hasil hutan. Waktu kerja bersifat lentur mengikuti kondisi alam; para nelayan biasanya turun ke sungai atau pesisir sejak dini hari, sementara pekebun beraktivitas pada pagi hingga siang. Hampir tidak ada kegiatan sektor formal, sehingga ekonomi keluarga banyak bertumpu pada pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Area kerja pun umumnya berada di sekitar kampung.

Sebagian warga menambah penghasilan melalui pekerjaan sampingan, seperti membuat kerajinan, memanen sagu musiman, atau menjual hasil laut. Pemuda kerap membantu pada kegiatan perikanan maupun pekerjaan konstruksi kampung. Perempuan tidak hanya mengelola rumah tangga, tetapi juga mengolah hasil tangkapan, menyiapkan kebutuhan untuk melaut, dan berdagang makanan dalam skala kecil. Keseluruhan pola ini menunjukkan bahwa sumber penghidupan masyarakat Kiura masih bercorak tradisional dan sangat bergantung pada sektor informal serta pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka.

Pengelolaan modal masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga keberlanjutan usaha kerap terhambat oleh pendapatan yang tidak stabil. Ketimpangan modal tetap tampak antara nelayan yang memiliki motor tempel dan mereka yang memakai alat tangkap tradisional. Meski begitu, budaya gotong royong membantu menjaga keseimbangan sosial di kampung.

2. Kepemilikan Modal

Kepemilikan modal produktif di Kampung Kiura masih bertumpu pada aset tradisional seperti perahu kayu, jaring dan pancing sederhana, serta alat berkebun manual. Hanya sedikit keluarga yang memiliki perahu bermesin atau kios kecil, sehingga kapasitas produksi tetap bergantung pada peralatan sederhana dan tenaga keluarga.

Aset rumah tangga pun beragam, hampir semua keluarga memiliki telepon seluler, tetapi banyak yang belum memiliki perlengkapan rumah tangga dasar. Penduduk migran umumnya memiliki perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, atau genset. Modal usaha sebagian besar berasal dari tabungan sendiri atau dukungan kelompok tani dan nelayan, sementara akses ke pinjaman formal masih terbatas. Bantuan pemerintah seperti perahu atau modal desa menjadi tambahan penting bagi usaha kecil.

3. Harga Barang dan Bahan Makanan

Harga barang di Kampung Kiura dipengaruhi oleh keterbatasan akses transportasi sungai dan laut yang menyebabkan tingginya biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga kebutuhan pokok dan hasil alam berbeda dengan wilayah perkotaan serta sangat dipengaruhi oleh musim, ketersediaan stok, dan jarak pasokan.

Untuk memberikan gambaran variasi harga barang di Kampung Kiura, berikut disajikan tabel harga komoditas utama dan sampingan yang umum diperdagangkan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah Di Kampung Kiura Tahun 2025

No.	Jenis Kebutuhan Pokok	Harga/Unit (Rp)	Keterangan
I	Sayuran, buah, ubi, hasil laut		
01.	Kangkung dan bayam	5.000/ikat	Kecil/besar
02.	Tomat	5.000/tumpuk	
03.	Cabe	5.000/tumpuk	
04.	Pisang	20.000/sisir	Kecil/besar
05.	Ubi-ubian	50.000/tumpuk	
06.	Sagu	30.000/potong	
07.	Ikan basah	15.000/ekor	
08.	Udang Laut	45.000/kg	
09.	Udang Kali	3.000/ekor	
10.	Karaka	30.000/ekor	
II	Jenis sembilan bahan pokok		
01.	Beras	18.000/kg	
02.	Gula pasir	25.000/kg	
03.	Garam	5.000/bungkus	
04.	Minyak goreng	20.000/liter	
05.	Minyak tanah	10.000/liter	
06.	Susu kaleng	15.000/kaleng	Cap Nona
07.	Supermi	4.000/bungkus	
08.	Kopi	8.000/bungkus	
09.	Telur	4.000/buah	
10.	Sabun	25.000/batang	
III	Jenis rokok		
01.	Gudang garam filter kecil	40.000/bungkus	
02.	Gudang garan filter besar	45.000/bungkus	
03.	Shag jenis anggur Kupu	8.000/bungkus	
04.	TROY	35.000/bungkus	
IV	Pakain dan alat tulis		
01.	Baju T-shirt	60.000/buah	All Size
02.	Kemeja	60.000/buah	
03.	Kain sarung	50.000/buah	
04.	Buku tulis	3.000/buah	
05.	Bolpoint	5.000/buah	
06.	Pensil	3.000/buah	
V	Jenis usaha pertanian		
01.	Kelapa	1000/buah	
VI	Jenis bahan bakar minyak (BBM)		
01.	Bensin	18.000/liter	
02.	Minyak tanah	10.000/liter	

Sumber: Data Primer, 2025

4. Potensi dan Peluang Ekonomi

Kampung Kiura memiliki beragam potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari sagu, ikan, udang, hasil kebun, hingga hasil hutan non-kayu, serta peluang wisata alam di kawasan pesisir dan mangrove. Potensi budaya juga cukup kuat, terlihat dari kerajinan tangan, tarian tradisional, kuliner lokal, hingga kesempatan mengembangkan ekowisata budaya berbasis tradisi Kamoro.

Dari sisi ekonomi, berbagai peluang dapat dikembangkan, seperti agroforestri berbasis sagu dan tanaman lokal, budidaya ikan dan udang, pengembangan UMKM pengolahan hasil alam, hingga jasa transportasi kampung yang mendukung mobilitas masyarakat. Namun sejumlah potensi tersebut masih belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan akses pasar, minimnya teknologi pengolahan, serta kapasitas usaha masyarakat yang masih terbatas.

Ke depan, pengembangan ekonomi Kampung Kiura memerlukan dukungan eksternal yang lebih kuat, baik dari pemerintah melalui program pemberdayaan desa, lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan pelatihan dan pendampingan, maupun perusahaan yang dapat berkontribusi melalui kemitraan dan tanggung jawab sosial. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang baru dan memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

5. Tingkat Kesejahteraan

Secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan warga Kampung Kiura masih berada pada kategori rendah. Mayoritas rumah tangga memperoleh pendapatan kurang dari Rp.1.000.000 per bulan, yang berarti berada di bawah batas garis kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025. Situasi ini menggambarkan bahwa kapasitas ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar masih sangat terbatas dan mudah terdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok.

Pola kesejahteraan antar keluarga di Kampung Kiura cenderung serupa, di mana sebagian besar warga masih berada pada kondisi ekonomi miskin. Hanya sedikit rumah tangga yang memiliki usaha kecil, seperti kios atau perahu bermesin, sehingga dapat menikmati tingkat ekonomi yang lebih stabil dibandingkan keluarga lainnya.

Akses masyarakat Kampung Kiura terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, masih sangat minim karena di kampung ini tidak terdapat sekolah

maupun fasilitas kesehatan. Seluruh kebutuhan layanan tersebut harus dicari di kampung lain, sehingga anak-anak perlu berjalan kaki atau menumpang perahu untuk bersekolah, sementara layanan kesehatan hanya dapat diperoleh di pusat distrik. Keterbatasan transportasi umum yang tidak tersedia secara rutin semakin memperberat upaya warga dalam mendapatkan layanan dasar.

Dalam aspek konsumsi, mayoritas keluarga masih bergantung pada makanan sederhana dengan kebiasaan makan dua kali sehari. Pangan lokal seperti sagu, ikan, udang, dan hasil kebun menjadi sumber makanan utama. Tingkat kecukupan gizi rumah tangga masih rendah karena menu harian kurang beragam. Meski biaya pendidikan dasar relatif ringan, pengeluaran untuk transportasi dan perlengkapan sekolah tetap menjadi tantangan bagi banyak keluarga.

Berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan jenis bansos lainnya belum dapat menjangkau semua warga yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap, seperti e-KTP dan KK, sehingga mereka belum masuk dalam data penerima bantuan.

Dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung tidak mengalami banyak perubahan. Letak kampung yang terpencil, akses yang terbatas, sedikitnya peluang ekonomi yang produktif, serta tidak adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan stagnasi kesejahteraan di Kampung Kiura.

G. Keamanan dan Ketertiban

1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban

Situasi keamanan di Kampung Kiura secara umum berada dalam kondisi yang cukup stabil dan terkendali. Meskipun demikian, beberapa bentuk gangguan keamanan masih pernah muncul, terutama yang berkaitan dengan konsumsi alkohol. Pengaruh alkohol kerap memicu perselisihan kecil di antara warga, khususnya kelompok anak muda, sehingga meningkatkan potensi gangguan ketertiban pada waktu-waktu tertentu, terutama pada malam hari atau setelah kegiatan sosial.

Selain persoalan miras, kasus kekerasan berbasis gender serta kekerasan terhadap anak juga pernah terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Insiden tersebut umumnya berasal dari konflik internal rumah tangga, tekanan ekonomi, maupun

kecemburuan. Meski tidak sering terjadi, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang cukup rentan terhadap gangguan keamanan di kampung.

Kampung Kiura sendiri tidak memiliki lokasi yang secara khusus diklasifikasikan sebagai daerah rawan. Gangguan keamanan lebih bersifat individual dan tidak terikat musim atau waktu tertentu, walau kecenderungan meningkat pada malam hari. Kelompok yang rentan terhadap berbagai insiden adalah anak muda yang terpapar konsumsi miras serta perempuan dan anak yang menghadapi risiko kekerasan rumah tangga.

2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban

Pengelolaan keamanan di Kampung Kiura bertumpu pada kelembagaan lokal, khususnya Linmas, yang berperan menjaga ketertiban, melakukan pengawasan lingkungan, dan menciptakan rasa aman bagi warga. Meskipun Koramil dan Polsek tidak berada langsung di kampung, keduanya tetap berperan penting sebagai mitra pendukung, baik melalui pembinaan teritorial, komunikasi sosial, maupun penanganan kasus hukum dan gangguan keamanan yang memerlukan kehadiran aparat resmi.

Keterbatasan jarak menuju Polsek memang menjadi tantangan tersendiri bagi penanganan cepat insiden yang membutuhkan intervensi kepolisian. Oleh karena itu, upaya pencegahan terus dilakukan melalui penguatan komunikasi warga, pemantauan lingkungan oleh Linmas, serta himbauan dari tokoh masyarakat terkait larangan atau pembatasan konsumsi alkohol, khususnya pada hari-hari yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Dengan sinergi antara masyarakat lokal, Linmas, Koramil, dan Polsek, keamanan Kampung Kiura secara keseluruhan dapat tetap terjaga dan dikelola dengan baik.

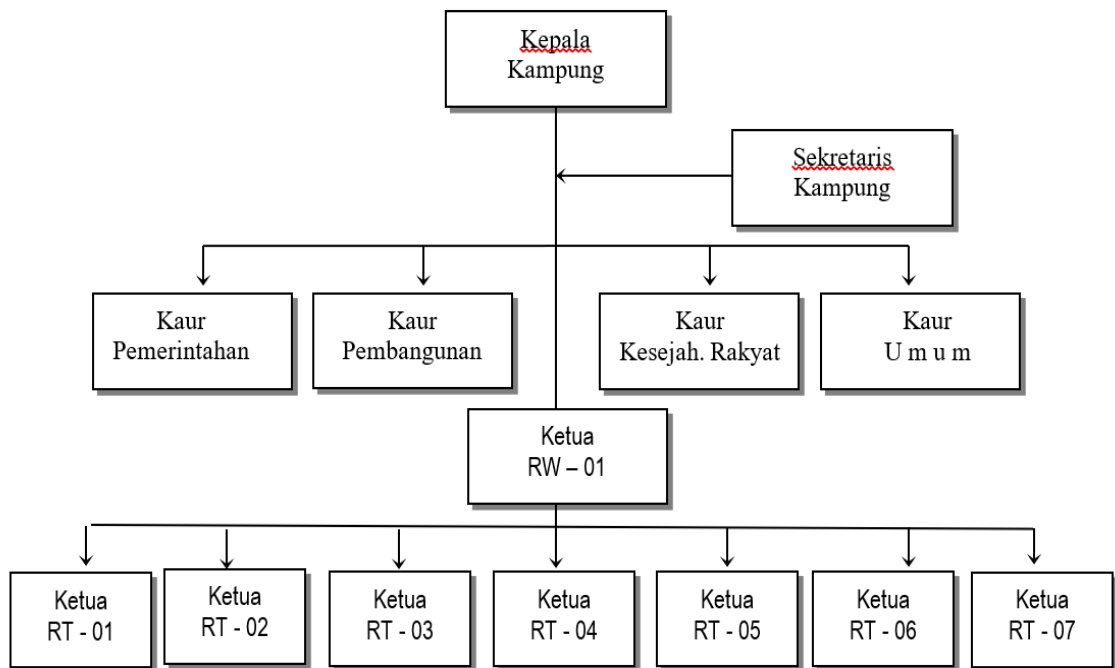
H. Kelembagaan Kampung

1. Lembaga Pemerintah

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kampung Kiura dipimpin oleh Kepala Kampung Ferdinand Samin, yang didampingi oleh Sekretaris Kampung, Daniel Sikora. Struktur pemerintahan kampung juga diperkuat oleh para Kepala Urusan (Kaur), yakni Kaur Keuangan (Markus Wanini), Kaur Pemerintahan (Dedirinto Amuniyu), Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan (Edowardus Hekyana), serta Kaur Perencanaan dan Umum (Emanuel Weyakoro).

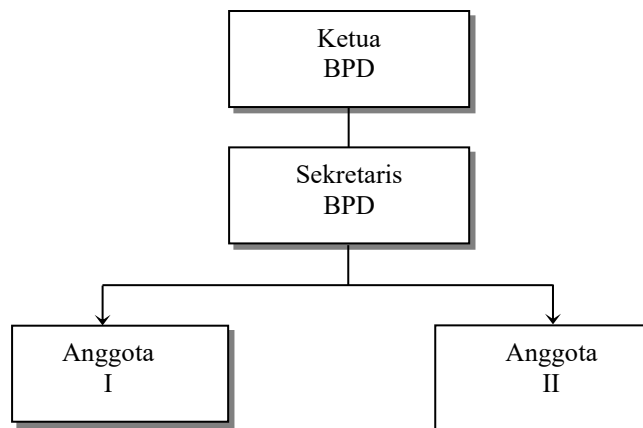
Pada level kewilayahan, pemerintahan kampung didukung oleh Kepala Dusun, Yakobus Mameyau, Ketua RW, Binidiktus Samin, serta tujuh Ketua RT yaitu RT 1 (Minggu Moyau), RT 2 (Nurgaya), RT 3 (Yustinus Take), RT 4 (Marius Potarepea), RT 5 (Rudi Amuniyu), RT 6 (Basman), dan RT 7 (Anton Eyau). Struktur pemerintahan kampung Kiura ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Kiura



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang berperan dalam menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses pengambilan keputusan, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Kiura



Susunan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kiura terdiri atas Ketua (Stanislaus Wamiyu), Sekretaris (Edowardus Samin), serta tiga anggota, yaitu Anggota 1 (Priska Mawiyu), Anggota 2 (Donatus Wanini), dan Anggota 3 (Mikael Nawiyura).

2. Lembaga Kemasyarakatan

Kampung Kiura memiliki struktur kelembagaan sosial yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan serta keterikatan antar warga. Lembaga adat masih menjadi acuan utama dalam menetapkan norma kehidupan, menyelesaikan perselisihan kecil, dan melestarikan nilai budaya setempat. Para tokoh adat tetap dihormati, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, pelestarian tradisi, dan penguatan identitas komunitas. Meskipun perannya lebih bersifat sosial dan kultural, lembaga adat menjadi salah satu unsur yang menopang stabilitas sosial di tingkat kampung.

Selain itu kelembagaan keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar warga Kampung Kiura memeluk agama Katolik dan bernaung dalam satu Komunitas Basis (Kombas St. Ambrosius) yang terhubung dengan Gereja Paroki Maria Bintang Laut. Kombas berfungsi sebagai tempat pembinaan iman sekaligus ruang mempererat hubungan sosial melalui ibadah rutin, ibadah sabda, serta kegiatan khusus seperti Rorasio pada bulan Mei dan devosi kepada Maria pada bulan Oktober. Tingginya keikutsertaan dan partisipasi warga dalam kegiatan Kombas menunjukkan kuatnya solidaritas dan rasa kebersamaan di antara masyarakat.

Kerjasama antara lembaga adat, lembaga keagamaan, dan pemerintah kampung terbangun dengan baik, terutama dalam menjalankan program sosial-keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Pemerintah kampung juga memberikan dukungan terhadap aktivitas Kombas, mengingat mayoritas penduduk Kampung Kiura beragama Katolik dan aktif dalam memperkuat nilai moral serta menjaga ketertiban sosial. Sinergi antar lembaga ini memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam menciptakan lingkungan yang rukun, saling menghargai, dan saling menopang. Secara keseluruhan, keberadaan lembaga adat dan keagamaan di Kampung Kiura menjadi landasan penting bagi ketahanan sosial, memperkuat integrasi masyarakat, serta mendorong berbagai kegiatan kolektif yang meningkatkan kesejahteraan warga.

3. Lembaga Politik

Masyarakat Kampung Kiura memperlihatkan perilaku politik yang cukup dewasa, tercermin dari tingginya partisipasi mereka dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada Tahun 2024. Warga hadir menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan meningkatnya kesadaran politik serta komitmen mereka terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat kampung.

Kelancaran pemilu tidak lepas dari koordinasi dan kerjasama yang solid antara berbagai pihak, yaitu penyelenggara pemilu (KPU Mimika, PPD Distrik Mimika Barat, dan KPPS Kampung Kiura), pemerintah kampung, tokoh adat, serta para perwakilan partai politik. Kolaborasi ini menciptakan situasi yang aman dan tertib, memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sinergi tersebut juga berkontribusi besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta transparansi selama proses pemungutan dan penghitungan suara di Kampung Kiura.

I. Sarana dan Prasarana

1. Transportasi dan Komunikasi

a. Akses jalan dan infrastruktur dasar

Akses transportasi darat di Kampung Kiura didukung oleh keberadaan jalan poros distrik (Jalan Cenderawasih), berupa jalan beton yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU. Jalan utama ini memiliki lebar sekitar 3 meter dan menjadi jalur vital bagi pergerakan masyarakat. Selain itu, sebagian besar jalan lingkungan dalam Kampung Kiura juga telah dibangun dalam bentuk jalan beton. Secara umum kondisi jalan cukup baik, meskipun belum seluruhnya terhubung. Beberapa segmen masih memerlukan peningkatan agar mobilitas warga dapat berlangsung lebih lancar.

b. Moda transportasi masyarakat

Moda transportasi darat di kampung ini masih sangat terbatas, sejalan dengan kondisi geografis serta tidak tersedianya kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil. Dalam kehidupan sehari-hari, warga biasanya menggunakan becak bermotor (bentor) dan gerobak dorong untuk memindahkan barang-barang kebutuhan di sekitar permukiman. Untuk keperluan ekonomi maupun perjalanan antar wilayah, masyarakat lebih banyak menggunakan perahu atau longboat

bermesin tempel (johnson). Selain dimanfaatkan untuk aktivitas penangkapan ikan, armada tersebut juga menjadi sarana utama menuju Pomako maupun Kota Timika. Kapal-kapal pengangkut barang yang memasok kebutuhan kios dan bahan bangunan secara rutin melakukan bongkar muat di dermaga umum, sehingga menjaga kelancaran pasokan lokal.

Transportasi udara dapat diakses melalui Bandara Kokonau di Apuri, namun operasionalnya tidak berlangsung secara rutin. Penerbangan lebih sering tersedia dalam bentuk carter, terutama saat terdapat kunjungan pemerintah atau lembaga tertentu. Masyarakat pada umumnya jarang menggunakan pesawat dan lebih memilih perjalanan laut karena biayanya lebih ekonomis.

c. Konektivitas antar kampung dan distrik

Konektivitas antara Kampung Kiura dan kampung-kampung di sekitarnya tergolong lancar, dengan waktu perjalanan sekitar 5-20 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Mobilitas antar kampung umumnya tidak mengalami hambatan berarti, kecuali saat terjadi hujan lebat bersamaan dengan pasang air laut yang tinggi. Dalam situasi tersebut, beberapa ruas jalan dapat tergenang sehingga akses sempat terputus. Setelah air kembali surut, jalur dapat digunakan kembali tanpa masalah. Kondisi musiman ini menjadi tantangan tersendiri bagi mobilitas warga, terutama di kawasan yang berada lebih rendah dan dekat dengan wilayah pesisir.

d. Transportasi umum

Hingga kini, Kampung Kiura belum memiliki layanan transportasi umum rutin seperti angkutan kampung atau perahu reguler. Tidak tersedia armada angkot maupun perahu penumpang yang beroperasi terjadwal. Meski demikian, perjalanan laut dapat dilakukan apabila ada penumpang dengan biaya sekitar Rp.500.000 per orang untuk sekali jalan. Ketidakhadiran transportasi umum reguler menuntut masyarakat untuk berkoordinasi secara mandiri apabila membutuhkan perjalanan keluar kampung.

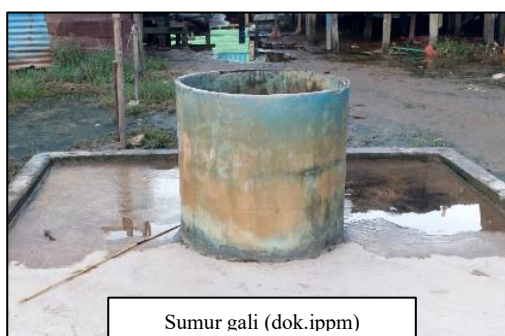
e. Komunikasi dan telekomunikasi

Layanan telekomunikasi di Kampung Kiura cukup memadai berkat adanya jaringan seluler 4G dari operator yang didukung oleh pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kampung untuk melayani Distrik Mimika Barat. Koneksi internet diperoleh melalui perangkat straling, yang dimanfaatkan

oleh warga maupun pemerintah kampung guna mendukung komunikasi dan berbagai keperluan administrasi. Meski demikian, kampung belum memiliki fasilitas radio komunikasi darurat, sehingga seluruh kebutuhan komunikasi, baik dalam situasi normal maupun mendesak, masih sepenuhnya bergantung pada jaringan seluler.

2. Air Bersih dan Sanitasi

Sumber air bersih bagi masyarakat Kampung Kiura umumnya berasal dari sumur gali yang digunakan untuk mandi dan mencuci, meskipun sumur ini sering terpengaruh



pasang air laut sehingga kualitas airnya menurun. Warga juga memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan serupa. Untuk keperluan minum dan memasak, air hujan menjadi sumber utama yang diandalkan sepanjang tahun. Pemerintah telah

membangun jaringan pipa dari menara air bersih di Kokonau menuju Kampung Kiura, tetapi fasilitas tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu proses peresmian. Dari sisi kualitas, air hujan merupakan satu-satunya sumber yang layak dikonsumsi, meski tetap perlu direbus, suatu kebiasaan yang belum sepenuhnya diterapkan oleh warga. Sementara itu, air sumur cenderung keruh sehingga memerlukan proses penyaringan dan pengendapan sebelum digunakan.

Sistem jaringan air bersih yang telah dipasang di Kampung Kiura diharapkan dapat segera berfungsi, meskipun saat ini baru menjangkau beberapa titik layanan umum. Mayoritas warga masih mengandalkan 2-3 bak penampung air di rumah, berupa profil tank berkapasitas 500-1.000 liter yang diperoleh melalui program dana desa. Sementara itu, bak penampungan air bersih umum yang pernah dibangun sebelumnya kini sudah tidak lagi beroperasi. Kondisi sanitasi lingkungan juga masih kurang memadai; sebagian besar rumah tangga memakai jamban cemplung atau septik tank sederhana dari drum bekas yang belum memenuhi standar kesehatan.

Pengelolaan sampah di Kampung Kiura masih belum efektif karena tidak adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS). Akibatnya, sebagian besar sampah rumah tangga dibakar dan belum ditangani dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu, kampung ini juga belum memiliki sistem drainase, sehingga saat musim hujan kerap

muncul genangan yang meningkatkan risiko banjir di sejumlah area permukiman. Secara keseluruhan, kondisi air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan di Kampung Kiura masih membutuhkan dukungan berkesinambungan agar lingkungan yang sehat dan layak huni dapat terwujud bagi seluruh masyarakat.

3. Penerangan / Energi

Sistem penerangan di Kampung Kiura sebagian besar sudah menggunakan listrik PLN berbasis mesin diesel dengan token prabayar, meski beberapa rumah masih menumpang aliran listrik dari tetangga karena keterbatasan biaya. Warga juga menyediakan genset sebagai cadangan saat terjadi pemadaman, terutama pada malam hari. Listrik PLN umumnya menyala selama 12 jam, dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIT, tetapi jadwal ini dapat berubah jika terjadi banjir rob atau gangguan teknis.

Jaringan listrik relatif stabil, namun pasokan dapat terganggu apabila suplai BBM terlambat, sehingga durasi layanan berkurang atau listrik padam beberapa hari. Daya listrik rumah tangga bervariasi, umumnya 450-900 watt, sedangkan pedagang memakai 900-1.300 watt untuk kebutuhan usaha. Selain itu, pemerintah distrik juga telah memasang panel surya di beberapa fasilitas publik dan sepanjang jalan utama untuk menambah sumber penerangan.

4. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kampung Kiura belum tersedia sama sekali, sehingga anak-anak harus pergi ke kampung lain di Distrik Mimika Barat untuk mengikuti pendidikan formal, baik pada jenjang PAUD/TK, SD, SMP, maupun SMA. Ketiadaan fasilitas pendidikan ini membuat akses belajar sangat bergantung pada transportasi dan kondisi lingkungan, terutama saat musim hujan atau pasang air laut.

Kegiatan pendidikan nonformal di dalam kampung juga masih terbatas. Anak-anak biasanya mengikuti kegiatan sekolah minggu secara rutin setiap hari minggu di Gereja Paroki Maria Bintang Laut di Kampung Migiwia, sementara pelatihan keterampilan bagi warga hanya dilakukan sesekali tanpa keberlanjutan program.

Selain itu, sarana pendukung seperti perpustakaan, alat peraga, atau fasilitas belajar lainnya belum tersedia. Walaupun jaringan internet kampung cukup memadai melalui perangkat straling, pemanfaatannya untuk kegiatan pendidikan masih sangat minim. Secara keseluruhan, sektor pendidikan di Kampung Kiura membutuhkan

pembangunan fasilitas dasar dan peningkatan layanan agar kebutuhan belajar masyarakat dapat terpenuhi.

5. Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat Kampung Kiura berada di bawah Puskesmas Distrik Mimika Barat di Kampung Apuri, yang memiliki layanan rawat inap dan menjadi pusat rujukan bagi seluruh kampung di distrik. Di Kiura sendiri terdapat satu posyandu yang dikunjungi tenaga kesehatan setiap tanggal 28 untuk layanan dasar dan pemantauan balita.

Puskesmas didukung 60 tenaga kesehatan dalam dua tim yang masing-masing dipimpin seorang dokter umum. Akses menuju puskesmas cukup mudah karena lokasinya berada di jalur utama distrik, sekitar 2,5 km dari Kiura atau 20 menit dengan berjalan kaki. Namun, keterjangkauan fisik tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemudahan akses layanan bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Selain itu, keterbatasan sarana transportasi dan kondisi cuaca tertentu sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin.

Kondisi kesehatan warga Kiura masih menghadapi berbagai masalah, termasuk tingginya kasus stunting, gizi buruk, cacingan, malaria, dan TBC, yang diperburuk oleh sanitasi buruk, cakupan penimbangan balita yang rendah, serta kepatuhan minum obat yang masih kurang. Program imunisasi berjalan baik, namun STBM dan edukasi gizi masih perlu ditingkatkan karena sebagian orang tua kurang memahami tanda-tanda gangguan pertumbuhan.

Obat dan fasilitas di puskesmas tersedia secara gratis, tetapi sebagian warga masih enggan memanfaatkan layanan karena merasa jaraknya jauh, belum terbiasa dengan prosedur pelayanan, dan adanya persepsi negatif terhadap tenaga kesehatan. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis budaya lokal dalam pelayanan kesehatan. Peningkatan sosialisasi, komunikasi, serta kehadiran tenaga kesehatan di tingkat kampung dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, penguatan peran kader kesehatan lokal dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan formal.

6. Ekonomi

Sebagian besar warga Kampung Kiura masih bergantung pada ekonomi subsisten seperti berkebun kecil, mengambil sagu, serta menangkap ikan, udang, kepiting, dan tambelo dengan peralatan sederhana. Ada pula warga yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan. Peluang UMKM sebenarnya ada, tetapi belum berkembang karena keterbatasan modal, pendampingan, dan belum adanya pasar yang dapat menampung produk lokal.

Kiura memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama hutan bakau, sungai, dan dusun sagu yang menyediakan bahan pangan dan hasil tangkapan bernilai ekonomi. Pola pemanfaatan sumber daya masih mengikuti kearifan lokal yang relatif berkelanjutan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Keterbatasan pengetahuan pengolahan, akses pasar, dan dukungan teknologi menjadi kendala utama dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan kebijakan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara produktif tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Kegiatan perdagangan masih kecil, ditandai dengan keberadaan tujuh kios milik pendatang. Semua barang pasokan berasal dari luar kampung dan membuat harga sering berubah. Tidak ada pasar lokal, sehingga transaksi berlangsung di kios atau antar warga. Kondisi ini menyebabkan pilihan barang terbatas dan daya tawar masyarakat relatif rendah. Ketergantungan pada pasokan luar kampung juga membuat harga kebutuhan pokok mudah terpengaruh oleh biaya transportasi dan cuaca. Dalam jangka panjang, pengembangan pasar kampung atau sentra ekonomi lokal berpotensi meningkatkan stabilitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat.

7. Peribadatan

Kehidupan keagamaan di Kampung Kiura terutama berpusat pada Gereja Katolik di Kampung Migiwia, tempat ibadah utama bagi mayoritas warga. Tidak ada masjid di Kiura; warga Muslim melakukan ibadah di Kampung Kokonau. Kondisi ini mengharuskan masyarakat menempuh jarak tertentu untuk menjalankan kegiatan ibadah secara rutin. Meskipun demikian, hubungan antarumat beragama di kampung tetap terjaga dengan baik dan berlangsung secara harmonis. Toleransi dan saling menghormati menjadi nilai yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan

keagamaan juga sering menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat kebersamaan antarwarga lintas agama.

Kegiatan keagamaan berlangsung aktif. Umat Katolik rutin mengikuti misa dan sekolah minggu di Gereja Maria Bintang Laut serta mengadakan doa kelompok, terutama pada Bulan Maria dan Bulan Rosario. Umat Islam mengikuti ibadah Jumat di masjid Kokonau. Selain ibadah rutin, perayaan hari besar keagamaan juga dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi keluarga dan komunitas. Aktivitas keagamaan tersebut berperan penting dalam memperkuat nilai moral, solidaritas, dan kebersamaan antarwarga Kampung Kiura.

Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Kiura, tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan rohani, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi langsung dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui lembaga pendidikan yang dikelola YPPK, Gereja berperan dalam menyediakan layanan pendidikan dasar serta menanamkan nilai-nilai moral dan kedisiplinan kepada anak-anak sejak usia dini. Selain itu, keberadaan Organisasi Orang Muda Katolik (OMK) menjadi wadah pembinaan generasi muda dalam aspek kepemimpinan, kebersamaan, dan penguatan karakter. Berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pelayanan sosial yang difasilitasi Gereja turut mendorong partisipasi aktif kaum muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Gereja tidak hanya memperkuat kehidupan iman, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun kohesi sosial dan masa depan generasi muda Kampung Kiura.

8. Olahraga dan Rekreasi

Kampung Kiura hingga saat ini belum memiliki fasilitas olahraga yang tersedia secara permanen di dalam wilayah kampung. Sarana olahraga terdekat adalah lapangan sepak bola yang berada di Kampung Kokonau, namun kondisinya kurang terawat dan kerap tergenang air laut saat pasang, sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Selain itu, pembangunan lapangan futsal yang berlokasi di depan kantor distrik masih dalam tahap pengerjaan dan belum dapat digunakan oleh masyarakat.

Di tengah keterbatasan tersebut, terdapat potensi positif di kalangan pemuda Kampung Kiura yang memiliki minat dan kebiasaan bermain bola voli sebagai kegiatan olahraga dan sosial. Aktivitas ini umumnya dilakukan secara sederhana di ruang terbuka atau halaman kampung dengan sarana terbatas. Apabila didukung

dengan penyediaan lapangan dan fasilitas yang memadai, potensi olahraga bola voli dapat dikembangkan sebagai sarana pembinaan pemuda, peningkatan kesehatan, serta penguatan kebersamaan dan solidaritas sosial di Kampung Kiura.

Fasilitas rekreasi juga hampir tidak tersedia; tidak ada taman, ruang terbuka publik, maupun area wisata pantai. Meski demikian, pemerintah kampung berencana mengembangkan ruang rekreasi sebagai bagian dari visi “kampung rasa kota” agar ke depan tersedia ruang publik yang lebih layak. Pengembangan ruang rekreasi ini diharapkan dapat menjadi tempat interaksi sosial, aktivitas pemuda, dan kegiatan keluarga. Selain itu, keberadaan ruang publik yang representatif berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap kampung. Dalam jangka panjang, fasilitas rekreasi juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari potensi wisata lokal yang mendukung perekonomian kampung.

Kegiatan kepemudaan masih sederhana dan belum terorganisir, ditambah sanggar seni tidak berfungsi optimal karena minimnya peralatan. Meski begitu, pemuda tetap aktif dalam kegiatan seni, olahraga, dan sosial yang ada. Olah raga yang biasa dilakukan adalah bola voli dan sepak bola, meskipun sarana prasarananya tidak memadai.

Kegiatan event di Kampung Kiura umumnya bersifat insidental dan hanya berlangsung menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada bulan Agustus. Pada momentum tersebut, masyarakat mengadakan berbagai lomba dan pertandingan olahraga sederhana yang melibatkan anak-anak, pemuda, hingga orang dewasa sebagai bentuk perayaan dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah warga kampung. Namun, di luar perayaan tahunan tersebut, belum banyak kegiatan rutin yang dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. Keterbatasan fasilitas, sarana pendukung, serta minimnya ruang publik menjadi faktor utama yang menghambat berkembangnya aktivitas sosial, olahraga, dan hiburan di tingkat kampung. Akibatnya, potensi kreativitas dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, belum dapat tersalurkan secara optimal.

Saat ini Kampung Kiura belum memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan secara nyata dan berkelanjutan. Keterbatasan objek wisata yang siap dikunjungi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi geografis yang

belum mendukung aksesibilitas menjadi kendala utama dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, belum tersedianya fasilitas dasar seperti transportasi yang memadai, akomodasi, dan ruang publik turut membatasi peluang kunjungan dari luar kampung. Meskipun demikian, peluang pengembangan wisata di masa depan tetap terbuka apabila dilakukan peningkatan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan secara bertahap. Dengan perencanaan yang matang serta dukungan pemerintah dan pihak terkait, potensi wisata berbasis alam dan budaya lokal dapat mulai dikaji sebagai alternatif pengembangan ekonomi kampung di kemudian hari.

BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma “membangun dari kampung ke kota”, yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Kiura pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota
Di Kampung Kiura

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Jalan dan jembatan kampung	- Jalan utama beton sudah tersedia namun banyak mengalami kerusakan akibat banjir rob dan pasang laut. - Akses ke rumah warga masih didominasi jembatan kayu yang sebagian sudah lapuk dan tidak aman.	Rehabilitasi jalan beton kampung, penggantian jembatan kayu dengan konstruksi permanen, serta peninggian badan jalan pada titik rawan genangan.	Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat
2.	Air bersih	Akses air bersih sangat terbatas, masyarakat masih bergantung pada air sungai, sumur galian dan penampungan air hujan yang jumlahnya tidak mencukupi.	Pembangunan sistem air bersih kampung (sumur bor/PAH terintegrasi), peningkatan kualitas dan distribusi air bersih ke rumah tangga.	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
3.	Sanitasi dan drainase	- Sanitasi belum layak, WC umum rusak, sebagian warga masih buang air di sungai/hutan - Drainase belum tersedia sehingga sering terjadi genangan.	Pembangunan jamban sehat keluarga, rehabilitasi WC umum, pembangunan saluran drainase kampung berbasis mitigasi banjir rob.	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR
4.	Listrik dan penerangan	Listrik diesel tersedia terbatas dan belum menjangkau seluruh rumah. Jam operasional terbatas.	Peningkatan kapasitas listrik kampung, perluasan jaringan ke seluruh rumah, penerangan jalan kampung.	Dinas ESDM, PLN
5.	Pengelolaan sampah	Tidak tersedia sistem pengelolaan sampah, sampah dibuang ke lingkungan dan sungai.	Penyediaan TPS kampung, sarana pengangkutan, edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Hasil FGD, 2025

B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Kiura pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal
Di kampung Kiura

No	Komponen Ekonomi Produktif	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Perikanan tangkap tradisional	Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional dengan peralatan sederhana dan bergantung musim.	Bantuan alat tangkap ramah lingkungan, penyimpanan hasil tangkap (cool box), dan peningkatan kapasitas nelayan.	Dinas Perikanan Kabupaten Mimika
2.	UMKM dan usaha kecil	Aktivitas UMKM sangat terbatas, belum ada pengolahan hasil perikanan atau sagu secara komersial.	Pelatihan UMKM, bantuan modal usaha, pengembangan produk olahan ikan, kepiting, dan sagu.	Dinas Koperasi dan UMKM
3.	Perdagangan kampung	Tidak terdapat pasar kampung, perdagangan masih terbatas pada kios kecil milik pendatang.	Pengembangan sentra ekonomi kampung, kios bersama, dan dukungan rantai distribusi hasil lokal.	Dinas Perdagangan
4.	Kerajinan dan ekonomi budaya	Terdapat potensi seni ukir dan pembuatan perahu tradisional, namun belum bernilai ekonomi optimal.	Pembinaan perajin, promosi produk budaya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya Kamoro.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	Transportasi air ekonomi	Transportasi air menjadi sarana utama mobilitas dan distribusi hasil produksi.	Peningkatan dermaga kampung dan dukungan sarana transportasi air untuk kegiatan ekonomi.	Dinas Perhubungan

Sumber: Hasil FGD, 2025

C. SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui

peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju, dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan di kampung Kiura pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan
Di kampung Kiura

No	Komponen SDM, Budaya dan Lingkungan	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Pendidikan masyarakat	Tingkat pendidikan penduduk rendah, tidak tersedia fasilitas pendidikan di kampung.	Dukungan akses pendidikan (transportasi sekolah), program kejar paket, dan beasiswa bagi anak kampung.	Dinas Pendidikan
2.	Kapasitas SDM produktif	Sebagian besar penduduk usia kerja belum memiliki keterampilan non-tradisional.	Pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pendampingan ekonomi produktif.	Dinas Tenaga Kerja
3.	Pelestarian budaya lokal	Nilai adat dan budaya masih kuat, namun belum terdokumentasi dan dikembangkan secara sistematis.	Penguatan kelembagaan adat, dokumentasi budaya, dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan budaya.	Dinas Kebudayaan
4.	Lingkungan dan mitigasi bencana	Kampung rentan banjir rob, abrasi, dan kerusakan lingkungan pesisir.	Program mitigasi bencana pesisir, rehabilitasi mangrove, dan edukasi lingkungan.	BPBD, Dinas Lingkungan Hidup
5.	Penguatan kelembagaan kampung	Kapasitas kelembagaan kampung dan kader masih terbatas.	Penguatan tata kelola kampung, pelatihan aparaturnya dan kader masyarakat.	DPMK Kabupaten Mimika

Sumber: Hasil FGD, 2025

BAGIAN V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan Profil dan Potensi Kampung Kiura yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa Kampung Kiura merupakan kampung pesisir dengan karakter sosial, budaya, dan lingkungan yang khas serta memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pemenuhan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Kampung Kiura masih memegang kuat nilai-nilai adat, sistem kekerabatan, bahasa lokal, serta praktik budaya Kamoro yang tercermin dalam struktur adat, ritual tradisional dan kehidupan sehari-hari. Relasi sosial antarwarga maupun antar suku, termasuk dengan masyarakat pendatang, berlangsung harmonis dan menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan kampung secara partisipatif.

Dari aspek kependudukan, Kampung Kiura memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil dengan struktur umur didominasi usia produktif. Namun demikian, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, ditandai dengan tingginya proporsi penduduk yang tidak pernah bersekolah atau hanya menamatkan pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja masyarakat.

Secara ekonomi, mata pencaharian penduduk masih sangat bergantung pada sektor subsisten berbasis sumber daya alam, terutama perikanan tangkap, pertanian tradisional, dan pemanfaatan hutan sagu serta mangrove. Minimnya lapangan kerja, rendahnya diversifikasi usaha, serta keterbatasan akses modal dan pasar menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah dan rentan terhadap perubahan lingkungan maupun musim.

Dari sisi perumahan dan lingkungan permukiman, sebagian besar rumah masih tergolong semi permanen dan tidak layak huni, dengan permasalahan utama berupa keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang belum memadai, sistem drainase yang buruk, serta tingginya risiko bencana pesisir seperti banjir rob dan abrasi. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan pengelolaan sampah juga masih membutuhkan peningkatan secara signifikan.

Secara keseluruhan, Profil Kampung Kiura menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi lokal yang dimiliki dengan kondisi pembangunan yang ada saat ini. Oleh karena itu,

diperlukan intervensi pembangunan yang terencana, berbasis data, kontekstual terhadap kondisi pesisir, serta melibatkan masyarakat secara aktif agar pembangunan kampung dapat berjalan berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024*, Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Barat dalam Angka Tahun 2024*, Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025)*. Dinas Dukcapil, Timika
- Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.